

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR 58 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3, LEVEL 2, DAN LEVEL 1 SERTA MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI WILAYAH SUMATERA, NUSA TENGGARA, KALIMANTAN, SULAWESI, MALUKU, DAN PAPUA

MENTERI DALAM NEGERI,

Presiden Republik Menindaklanjuti arahan Indonesia yang menginstruksikan agar melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 (tiga), Level 2 (dua), dan Level 1 (satu) Corona Virus Disease (COVID-19) di wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua sesuai dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan asesmen oleh Kementerian Kesehatan serta lebih mengoptimalkan Pos Komando (Posko) Penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19, berkenaan dengan hal tersebut diinstruksikan:

Kepada : 1. Gubernur; dan

2. Bupati/Wali kota,

Untuk

KESATU : Khusus Kepada:

- Gubernur Aceh dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;

 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kota Banda Aceh; 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Simeulue, Kabupaten Aceh Tengah, Kota Lhokseumawe, Kota Sabang, dan Kota Langsa; dan
 - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Barat, Aceh Besar, Kabupaten Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Pidie Jaya, dan Kota Subulussalam,
- b. Gubernur Sumatera Utara dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Batu Bara, Kota Gunungsitoli, Kota Binjai, Kabupaten Nias, Kabupaten Dairi, Kota Sibolga, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Samosir;

- 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Karo, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Langkat, Kabupaten Nias Utara, Kota Medan, Kota Pematangsiantar, Kota Tebing Tinggi, dan Kota Padang Sidempuan; dan
- 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Simalungun, Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, dan Kota Tanjung Balai,
- c. Gubernur Kalimantan Tengah dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Pulang Pisau;
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Barito Timur, dan Kota Palangka Raya; dan
 - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Selatan, dan Kabupaten Katingan,
- d. Gubernur Kalimantan Selatan dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
 - 1) Level 1 (satu) Kabupaten Tanah Bumbu;
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Tapin, Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan Kota Banjarbaru; dan
 - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Tabalong, dan Kabupaten Balangan,
- e. Gubernur Kalimantan Timur dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kota Balikpapan, Kota Bontang Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Berau, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Samarinda; dan
 - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Paser,
- f. Gubernur Kalimantan Utara dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria Level 2 (dua) yaitu Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Nunukan,

- g. Gubernur Sulawesi Utara dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Minahasa Tenggara;
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kota Manado, Kota Bitung, Kota Tomohon, dan Kota Kotamobagu; dan
 - yaitu Kabupaten 3) Level 3 (tiga) Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro,
- h. Gubernur Sulawesi Tengah dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Morowali;
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Buol, Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Tojo Una-Una, dan Kota Palu; dan
 - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Banggai, Kabupaten Poso, Kabupaten Donggala, Banggai Kabupaten Kabupaten Toli Toli, Kepulauan, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Sigi,
- i. Gubernur Sulawesi Selatan dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
 - 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Wajo, Kabupaten Luwu Utara, Kota Makassar, dan Kota Pare Pare; dan
 - (tiga) yaitu Kabupaten 2) Level Enrekang, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Jeneponto. Kabupaten Takalar. Kabupaten Kabupaten Sinjai, Gowa, Kabupaten Bone, Kabupaten Maros, Kabupaten Barru, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Luwu, dan Kota Palopo,
- j. Gubernur Sulawesi Tenggara dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Konawe Utara;
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Muna, Kabupaten Buton, Kabupaten Konawe, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Kolaka Kabupaten Konawe Kepulauan, Timur, Muna Kabupaten Barat, Kabupaten Tengah, Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Bombana, Kabupaten Kolaka Utara, Baubau, dan Kota Kendari; dan
 - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Kolaka dan Kabupaten Konawe Selatan,
- k. Gubernur Gorontalo dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Boalemo, dan Kota Gorontalo; dan

- 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kabupaten Bone Bolango,
- Gubernur Sulawesi Barat dan Bupati untuk wilayah Kabupaten dengan kriteria Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Pasangkayu, Kabupaten Majene, Kabupaten Polewali Mandar, dan Kabupaten Mamuju Tengah,
- m. Gubernur Maluku dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
 - 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Buru, Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Tengah, Kota Ambon, dan Kota Tual; dan
 - 2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Kepulauan Aru, dan Kabupaten Seram Bagian Timur,
- n. Gubernur Maluku Utara dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Pulau Morotai;
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Pulau Taliabu, Kota Ternate, dan Kota Tidore Kepulauan; dan
 - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, dan Kabupaten Halmahera Timur.
- o. Gubernur Papua dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Keerom, dar Kabupaten Merauke;
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Mimika, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Asmat, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Nabire, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Tolikara, dan Kota Jayapura; dan
 - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Supiori, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Waropen, Kabupaten Mappi, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Nduga, Kabupaten Puncak, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Deiyai,
- p. Gubernur Papua Barat dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Manokwari;
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Tambrauw, dan Kabupaten Sorong Selatan; dan
 - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Fak Fak, Kabupaten Sorong, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Maybrat, dan Kota Sorong.

KEDUA

: Penetapan level wilayah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berpedoman pada Indikator Penyesuaian Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pembatasan Sosial dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan ditambahkan dengan indikator capaian total vaksinasi dosis 1 (satu), dimana level PPKM kabupaten/kota dinaikkan 1 (satu) level apabila capaian total vaksinasi dosis 1 (satu) kurang dari 40% (empat puluh persen).

KETIGA

- PPKM Level 3 (tiga) pada Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut:
- a. Pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas pembelajaran jarak dan/atau jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 TAHUN 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 TAHUN 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Masa Pandemi di Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen), kecuali untuk:
 - 1) SDLB, MILB, SMPLB, SMALB, dan MALB maksimal 62% (enam puluh dua persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas; dan
 - 2) PAUD maksimal 33% (tiga puluh tiga persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas,
- b. pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 50% (lima puluh lima persen) maksimal staf WFO dengan protokol kesehatan secara ketat, namun apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19, maka sektor yang bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari;
- c. pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti didalamnya Pos kesehatan termasuk Pelavanan (Posyandu), bahan pangan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar logistik, perhotelan, konstruksi, strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall tetap dapat beroperasi (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

- d. industri dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, namun apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19, maka industri bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari;
- e. pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah;
- f. pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum:
 - 1) warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, *handsanitizer*, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah; dan
 - 2) restoran/rumah makan dan kafe dengan skala kecil, sedang atau besar baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall dapat melayani makan ditempat/dine in dibatasi jam operasional sampai Pukul 21.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen), 2 (dua) orang menerima makan meja dan pulang/delivery/take away dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- g. kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan diizinkan beroperasi 50% (lima puluh persen) pada Pukul 10.00 hingga 21.00 waktu setempat dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah;
- h. bioskop yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah terhadap semua pengunjung dan pegawai;
 - 2) kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam Peduli Lindungi yang boleh masuk;
 - 3) anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun dilarang masuk;
 - 4) restoran dan kafe di dalam area bioskop dapat melayani makan ditempat/dine in dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh lima persen), 2 (dua) orang per meja dan menerima makan dibawa pulang/delivery/take away dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
 - 5) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Kementerian Kesehatan:

- i. pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- j. tempat ibadah (Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah dengan pengaturan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) atau maksimal 50 (lima puluh) orang, namun lebih dioptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;
- k. pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) diizinkan beroperasi 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah;
- pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan beroperasi 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah;
- m. kegiatan olahraga/ pertandingan olahraga diperbolehkan, antara lain:
 - 1) diselenggarakan oleh Pemerintah tanpa penonton atau suporter dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat;
 - 2) olahraga mandiri/individual dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat;
 - 3) fasilitas olahraga di ruang terbuka diizinkan dibuka dengan jumlah orang 50% (lima puluh persen) dari kapasitas maksimal dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah; dan
 - 4) fasilitas pusat kebugaran/gym diizinkan dibuka dengan jumlah orang 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas maksimal dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah;
- n. untuk kegiatan resepsi pernikahan dan hajatan (kemasyarakatan) maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas atau maksimal 50 (lima puluh) orang dan tidak ada hidangan makanan ditempat dengan penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah;
- o. pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/seminar/ pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup untuk sementara waktu, sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah setempat;
- p. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

- q. persyaratan perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional;
- r. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa menggunakan masker; dan
- s. pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.
- : PPKM Level 2 (dua) dan Level 1 (satu) pada Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dengan menerapkan pengaturan PPKM dengan kriteria zonasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan):
 - 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau dan Zona Kuning, melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan pengaturan teknis dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
 - 2) untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye, melaksanakan pembelajaran di pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 TAHUN 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan bagi satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen), kecuali untuk:
 - a) SDLB, MILB, SMPLB, SMALB, dan MALB maksimal 62% (enam puluh dua persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas; dan
 - b) PAUD maksimal 33% (tiga puluh tiga persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas,
 - 3) untuk wilayah yang berada dalam Zona Merah, melaksanakan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di satuan pendidikan dilakukan melalui pembelajaran jarak jauh;

KEEMPAT

- b. pelaksanaan kegiatan perkantoran/tempat kerja (Perkantoran Pemerintah/ Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah, Perkantoran BUMN/BUMD/Swasta):
 - 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau pembatasan dilakukan dengan menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan WFO sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
 - 2) untuk wilayah yang berada dalam Zona Kuning dan Zona Oranye pembatasan dilakukan dengan menerapkan WFH sebesar 50% (lima puluh persen) dan WFO sebesar 50% (lima puluh persen);
 - 3) untuk wilayah yang berada dalam Zona Merah pembatasan dilakukan dengan menerapkan WFH sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan WFO sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
 - 4) pelaksanaan WFH dan WFO sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2), dan angka 3) diatas, dilakukan dengan:
 - a) menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat:
 - b) pengaturan waktu kerja secara bergantian;
 - c) pada saat WFH tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain; dan
 - d) pemberlakuan WFH dan WFO disesuaikan dengan pengaturan dari Kementerian/ Lembaga atau masing-masing Pemerintah Daerah;
- c. pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti, kesehatan termasuk didalamnya Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu. tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat (pasar, pokok swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall tetap dapat beroperasi 100% persen) pengaturan (seratus dengan operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- d. pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/ pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah:
- e. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum:
 - 1)warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker,

- mencuci tangan, *handsanitizer*, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah;
- 2)rumah makan/restoran kafe, baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall:
 - a) makan/minum di tempat sebesar 50% (lima puluh persen) dari kapasitas;
 - b) jam operasional dibatasi sampai dengan Pukul 21.00 waktu setempat;
 - c) untuk layanan makanan melalui pesanantar/dibawa pulang tetap diizinkan sampai dengan jam 21.00 waktu setempat;
 - d) untuk restoran yang hanya melayani pesanantar/dibawa pulang dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam; dan
 - e) pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a) sampai dengan huruf d) dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- f. pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/ pusat perdagangan:
 - 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau:
 - a) pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 21.00 waktu setempat; dan
 - b) pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dengan dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah,
 - 2) untuk wilayah yang berada dalam Zona Kuning dan Zona Oranye:
 - a) pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 21.00 waktu setempat; dan
 - b) pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah,
 - 3) untuk wilayah yang berada dalam Zona Merah:
 - a) pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 17.00 waktu setempat; dan
 - b) pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah,
- g. pelaksanaan kegiatan bioskop yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall untuk wilayah yang berada dalam:
 - 1) Zona Oranye dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah terhadap semua pengunjung dan pegawai;

- b) kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam Peduli Lindungi yang boleh masuk;
- c) anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun dilarang masuk;
- d) restoran dan kafe di dalam area bioskop dapat melayani makan ditempat/dine in dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh lima persen), 2 (dua) orang per meja dan menerima makan dibawa pulang/delivery/take away dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- e) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan,
- 2) Zona Kuning dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah terhadap semua pengunjung dan pegawai;
 - b) kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam Peduli Lindungi yang boleh masuk;
 - c) anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun diperbolehkan masuk dengan syarat didampingi orang tua;
 - d) restoran dan kafe di dalam area bioskop dapat melayani makan ditempat/dine in dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh lima persen), 2 (dua) orang per meja dan menerima makan dibawa pulang/delivery/take away dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - e) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan,
- 3) Zona Hijau dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah terhadap semua pengunjung dan pegawai;
 - b) kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam Peduli Lindungi yang boleh masuk;
 - c) anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun diperbolehkan masuk dengan syarat didampingi orang tua;

- d) restoran dan kafe di dalam area bioskop dapat melayani makan ditempat/dine in dengan kapasitas pengunjung 75% (tujuh puluh lima persen), 2 (dua) orang per meja dan menerima makan dibawa pulang/delivery/take away dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- e) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan,
- h. pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- i. pelaksanaan kegiatan ibadah (pada tempat ibadah di Masjid, Mushola, Gereja, Pura dan Vihara serta tempat ibadah lainnya):
 - 1) untuk wilayah Zona Hijau, kegiatan peribadatan pada tempat ibadah dapat dilakukan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;
 - 2) untuk wilayah Zona Kuning, kegiatan peribadatan pada tempat ibadah dapat dilakukan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;
 - 3) untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye, kegiatan peribadatan pada tempat ibadah dapat dilakukan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama; dan
 - 4) untuk wilayah yang berada dalam Zona Merah, kegiatan peribadatan pada tempat ibadah dapat dilakukan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama,
- j. pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya):
 - 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah;
 - 2) untuk wilayah yang berada dalam Zona Kuning, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah; dan

- 3) untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye dan Zona Merah, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah,
- k. pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan):
 - 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah;
 - 2) untuk wilayah yang berada dalam Zona Kuning, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah; dan
 - 3) untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye dan Zona Merah, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah,
- 1. resepsi pernikahan dan kegiatan hajatan (kemasyarakatan):
 - 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau, diizinkan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan tidak ada hidangan makanan ditempat; dan
 - 2) untuk wilayah selain yang berada dalam Zona Hijau, diizinkan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan tidak ada hidangan makanan ditempat,
- m. pelaksanaan kegiatan seminar rapat. dan luring rapat/ pertemuan (lokasi seminar/ pertemuan ditempat umum dapat yang menimbulkan keramaian dan kerumunan):
 - 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau, Zona Kuning, dan Zona Oranye diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat; dan
 - 2) untuk wilayah pada Zona Merah ditutup untuk sementara waktu sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah setempat,
- n. persyaratan perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional;

- o. penggunaan transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan *on line*), ojek (pangkalan dan *on line*), dan kendaraan sewa/rental), dapat beroperasi dengan melakukan pengaturan kapasitas, jam operasional dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturan lebih lanjut diatur oleh pemerintah daerah; dan
- p. pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.
- : Pelaksanaan kegiatan (*event*) keolahragaan dapat diselenggarakan di wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria level 3 (tiga), level 2 (dua), dan Level 1 (satu), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. capaian vaksin dosis pertama paling sedikit 60% (enam puluh persen);
 - b. wajib membentuk Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 - c. seluruh pemain, ofisial, kru media, dan staf pendukung wajib menggunakan aplikasi peduli lindungi untuk melakukan skrining terhadap orang yang keluar masuk pada tempat pelaksanaan kompetisi dan Latihan;
 - d. pelaksanaan kompetisi tidak diperbolehkan menerima penonton langsung di stadion. Kegiatan menonton bersama oleh supporter juga tidak diperbolehkan;
 - e. seluruh pemain, ofisial, kru media, dan staf pendukung yang hadir dalam kompetisi wajib sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua, hasil negatif PCR (H-1) dan hasil negatif Antigen pada hari pertandingan; dan
 - f. Kompetisi Sepak Bola Liga 2 (dua) dapat dilaksanakan:
 - l) mengikuti aturan protokol kesehatan Kementerian Kesehatan;
 - 2) dapat dilakukan uji coba dengan menerima penonton paling banyak 25% (dua puluh lima persen) atau paling banyak 5.000 (lima ribu) penonton yang ditentukan oleh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia dan penyelenggara.

KEENAM

KELIMA

- : a. pembatasan pintu masuk perjalanan penumpang internasional bagi warga negara Indonesia diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pintu masuk udara dengan menggunakan penerbangan langsung hanya melalui Bandar Udara Soekarno Hatta di Provinsi Banten, Raja Haji Fisabilillah di Provinsi Kepulauan Riau, dan Sam Ratulangi di Provinsi Sulawesi Utara;
 - 2) pintu masuk laut hanya melalui pelabuhan Batam dan Tanjung Pinang di Provinsi Kepulauan Riau dan Nunukan di Provinsi Kalimantan Utara; dan
 - 3) pintu masuk darat hanya melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk dan Entikong di Provinsi Kalimantan Barat serta Motaain di Provinsi Nusa Tenggara Timur,
 - b. pembatasan pintu masuk perjalanan penumpang internasional bagi warga negara asing diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- pintu masuk udara dengan menggunakan penerbangan langsung hanya melalui Bandar Udara Soekarno Hatta di Provinsi Banten, Raja Haji Fisabilillah di Provinsi Kepulauan Riau, dan Sam Ratulangi di Provinsi Sulawesi Utara;
- 2) pintu masuk laut di Provinsi Bali dan Provinsi Kepulauan Riau dapat menggunakan kapal pesiar (*cruise*) atau kapal layar (*yacht*),
- c. pengaturan teknis terkait pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf b dan pada masa transisi akan diatur lebih lanjut oleh Kementerian Perhubungan.
- : Gubernur setelah mendapatkan suplai vaksin dari Kementerian Kesehatan, segera mendistribusikan ke Kabupaten/Kota dan tidak ditahan sebagai cadangan (stok) di Provinsi.
- : Gubernur, Bupati dan Wali kota melarang setiap bentuk aktivitas/ kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan.
- : Gubernur, Bupati dan Wali kota berkoordinasi dan berkolaborasi dengan TNI, Polri dan Kejaksaaan dalam mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan PPKM.
- Melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi dengan prinsip sebagai berikut:
 a. COVID-19 paling menular pada kondisi tertutup,
 - a. COVID-19 paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan pertemuan panjang (lebih dari 15 (lima belas)menit), interaksi jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;
 - b. penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang;
 - c. mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;
 - d. jenis masker yang baik akan lebih melindungi, penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan (>4 (lebih dari empat) jam);
 - e. penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan jarak interaksi, durasi, dan faktor ventilasi udara untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas;
 - f. pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;
 - 2) jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain. mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan
 - 3) mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan COVID-19,

KETUJUH

KEDELAPAN

KESEMBILAN

KESEPULUH

- g pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan
 - 2) dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi,
- h. pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan; dan
 - 2) ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka *air purifier* dengan *High Efficiency Particulate Air* (HEPA) filter dapat digunakan di dalam ruangan,
- i. dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan;
- j. penguatan 3T (*testing*, *tracing*, *treatment*) perlu terus diterapkan:

1) *testing* perlu ditingkatkan sesuai dengan tingkat *positivity rate* mingguan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Positivity	rate	Jumlah tes (per 1000
Mingguan		penduduk per minggu)
<5%		1
>5%-<15%	%	5
>15%-<25	%	10
>25%		15

Testing perlu terus ditingkatkan dengan target positivity rate <5% (kurang dari lima persen); target testing harian adalah jumlah tes harian minimal yang harus dipenuhi kabupaten/kota; orang yang dihitung ke dalam target testing adalah suspek dan kontak dari kasus konfirmasi, bukan orang tidak bergejala yang diskrining. Target jumlah testing harus dicapai di tingkat kabupaten/kota mengikuti tabel sebagai berikut:

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Target Jumlah Orang Dites/ Hari
1.	Aceh	Kabupaten Aceh Selatan	526
2.		Kabupaten Aceh	470
		Tenggara	
3.		Kabupaten Aceh Timur	63
4.		Kabupaten Aceh Tengah	461
5.		Kabupaten Aceh Barat	3
6.		Kabupaten Aceh Besar	61
7.		Kabupaten Pidie	65
8.		Kabupaten Aceh Utara	90

	1		
9.		Kabupaten Simeulue	14
10.		Kabupaten Aceh Singkil	269
11.		Kabupaten Bireuen	1022
12.			
12.		Kabupaten Aceh Barat	22
		Daya	
13.		Kabupaten Gayo Lues	14
14.		Kabupaten Aceh Jaya	205
15.		Kabupaten Nagan Raya	24
16.		Kabupaten Aceh	43
10.		_	73
		Tamiang	
17.		Kabupaten Bener	21
		Meriah	
18.		Kabupaten Pidie Jaya	350
19.		Kota Banda Aceh	592
20.		Kota Sabang	5
21.		Kota Lhokseumawe	
			30
22.		Kota Langsa	26
23.		Kota Subulussalam	12
24.	Sumatera	Kabupaten Tapanuli	57
۷.,	Utara	Tengah	01
0.5	Otara		CFC
25.		Kabupaten Tapanuli	656
		Utara	
26.		Kabupaten Tapanuli	41
		Selatan	
27.		Kabupaten Nias	21
28.		Kabupaten Langkat	151
29.		Kabupaten Karo	62
30.		Kabupaten Deli Serdang	331
31.		Kabupaten Simalungun	125
32.		Kabupaten Asahan	106
		Kabupaten	74
33.		Labuhanbatu	7 -
34.		Kabupaten Dairi	41
35.		Kabupaten Toba	396
		Samosir	
36.		Kabupaten Mandailing	979
50.		Natal	515
37.			477
		Kabupaten Nias Selatan	47
38.		Kabupaten Pakpak	110
		Bharat	
39.		Kabupaten Humbang	416
05.		Hasundutan	
40.			070
		Kabupaten Samosir	272
41.		Kabupaten Serdang	88
		Bedagai	
42.		Kabupaten Batu Bara	61
43.		Kabupaten Padang	41
		Lawas Utara	
44.		Kabupaten Padang	43
77.			73
		Lawas	
45.		Kabupaten	51
		Labuhanbatu Selatan	
46.		Kabupaten	300
		Labuhanbatu Utara	
47.		Kabupaten Nias Utara	12
48.		Kabupaten Nias Barat	13
49.		Kota Medan	609
50.		Kota Pematangsiantar	362
51.		Kota Sibolga	26
52.		Kota Tanjung Balai	37
53.		Kota Binjai	33
54.			
		Kota Tebing Tinggi	331
55.		Kota Padang Sidempuan	21
56.		Kota Gunungsitoli	53
57.	Sumatera	Kabupaten Pesisir	68
	Barat	Selatan	
58.	-uiui	Kabupaten Solok	54
59.			
აყ.		Kabupaten Sijunjung	35

	•		
60.		Kabupaten Tanah Datar	50
61.		Kabupaten Padang	502
		Pariaman	
62.		Kabupaten Agam	72
63.		Kabupaten Lima Puluh	56
		Kota	
64.		Kabupaten Pasaman	41
65.		Kabupaten Kepulauan	14
00.		Mentawai	1.
66.		Kabupaten	570
00.		Dharmasraya	370
67.			26
67.		Kabupaten Solok Selatan	20
			67
68.		Kabupaten Pasaman	67
69.		Barat Vote Podens	0110
		Kota Padang	2110
70.		Kota Solok	11
71.		Kota Sawahlunto	9
72.		Kota Padang Panjang	8
73.		Kota Bukittinggi	19
74.		Kota Payakumbuh	20
75.		Kota Pariaman	13
76.	Riau	Kabupaten Kampar	126
77.		Kabupaten Indragiri	103
		Hulu	
78.		Kabupaten Bengkalis	81
		Kabupaten Indragiri	103
79.		Hilir	100
80.		Kabupaten Pelalawan	1108
81.		Kabupaten Rokan Hulu	103
82.			
		Kabupaten Rokan Hilir	1559
83.		Kabupaten Siak	71
84.		Kabupaten Kuantan	691
		Singingi	
85.		Kabupaten Kepulauan	27
		Meranti	
86.		Kota Pekanbaru	2486
87.		Kota Dumai	44
88.	Jambi	Kabupaten Kerinci	
~~.	Jambi		34
89.	Jambi	Kabupaten Merangin	34 56
	Jambi	Kabupaten Merangin	
89. 90.	Jambi	Kabupaten Merangin Kabupaten Sarolangun	56 44
89. 90. 91.	Jamoi	Kabupaten Merangin Kabupaten Sarolangun Kabupaten Batanghari	56 44 582
89. 90.	Jamoi	Kabupaten Merangin Kabupaten Sarolangun Kabupaten Batanghari Kabupaten Muaro	56 44
89. 90. 91. 92.	Jamoi	Kabupaten Merangin Kabupaten Sarolangun Kabupaten Batanghari Kabupaten Muaro Jambi	56 44 582 65
89. 90. 91.	Jamoi	Kabupaten Merangin Kabupaten Sarolangun Kabupaten Batanghari Kabupaten Muaro Jambi Kabupaten Tanjung	56 44 582
89. 90. 91. 92.	Jamoi	Kabupaten Merangin Kabupaten Sarolangun Kabupaten Batanghari Kabupaten Muaro Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Barat	56 44 582 65 48
89. 90. 91. 92.	Jamoi	Kabupaten Merangin Kabupaten Sarolangun Kabupaten Batanghari Kabupaten Muaro Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kabupaten Tanjung	56 44 582 65
89. 90. 91. 92. 93.	Jamoi	Kabupaten Merangin Kabupaten Sarolangun Kabupaten Batanghari Kabupaten Muaro Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur	56 44 582 65 48 31
89. 90. 91. 92. 93. 94.	Jamoi	Kabupaten Merangin Kabupaten Sarolangun Kabupaten Batanghari Kabupaten Muaro Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Kabupaten Bungo	56 44 582 65 48 31
89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96.	Jamoi	Kabupaten Merangin Kabupaten Sarolangun Kabupaten Batanghari Kabupaten Muaro Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Kabupaten Bungo Kabupaten Tebo	56 44 582 65 48 31 54 765
89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97.	Jamoi	Kabupaten Merangin Kabupaten Sarolangun Kabupaten Batanghari Kabupaten Muaro Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Kabupaten Bungo Kabupaten Tebo Kota Jambi	56 44 582 65 48 31 54 765 86
89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98.		Kabupaten Merangin Kabupaten Sarolangun Kabupaten Batanghari Kabupaten Muaro Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Kabupaten Bungo Kabupaten Tebo Kota Jambi Kota Sungai Penuh	56 44 582 65 48 31 54 765 86 13
89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97.	Sumatera	Kabupaten Merangin Kabupaten Sarolangun Kabupaten Batanghari Kabupaten Muaro Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Kabupaten Bungo Kabupaten Tebo Kota Jambi Kota Sungai Penuh Kabupaten Ogan	56 44 582 65 48 31 54 765 86
89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99.		Kabupaten Merangin Kabupaten Sarolangun Kabupaten Batanghari Kabupaten Muaro Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Kabupaten Bungo Kabupaten Tebo Kota Jambi Kota Sungai Penuh Kabupaten Ogan Komering Ulu	56 44 582 65 48 31 54 765 86 13 54
89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98.	Sumatera	Kabupaten Merangin Kabupaten Sarolangun Kabupaten Batanghari Kabupaten Muaro Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Kabupaten Bungo Kabupaten Tebo Kota Jambi Kota Sungai Penuh Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan	56 44 582 65 48 31 54 765 86 13
89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99.	Sumatera	Kabupaten Merangin Kabupaten Sarolangun Kabupaten Batanghari Kabupaten Muaro Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Kabupaten Bungo Kabupaten Tebo Kota Jambi Kota Sungai Penuh Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ilir	56 44 582 65 48 31 54 765 86 13 54
89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.	Sumatera	Kabupaten Merangin Kabupaten Sarolangun Kabupaten Batanghari Kabupaten Muaro Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Kabupaten Bungo Kabupaten Tebo Kota Jambi Kota Sungai Penuh Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Muara Enim	56 44 582 65 48 31 54 765 86 13 54 122 94
89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99.	Sumatera	Kabupaten Merangin Kabupaten Sarolangun Kabupaten Batanghari Kabupaten Muaro Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Kabupaten Bungo Kabupaten Tebo Kota Jambi Kota Sungai Penuh Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ilir	56 44 582 65 48 31 54 765 86 13 54
89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.	Sumatera	Kabupaten Merangin Kabupaten Sarolangun Kabupaten Batanghari Kabupaten Muaro Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Kabupaten Bungo Kabupaten Tebo Kota Jambi Kota Sungai Penuh Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Muara Enim	56 44 582 65 48 31 54 765 86 13 54 122 94
89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102.	Sumatera	Kabupaten Merangin Kabupaten Sarolangun Kabupaten Batanghari Kabupaten Muaro Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Kabupaten Bungo Kabupaten Tebo Kota Jambi Kota Sungai Penuh Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Muara Enim Kabupaten Musi Rawas	56 44 582 65 48 31 54 765 86 13 54 122 94 59
89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103.	Sumatera	Kabupaten Merangin Kabupaten Sarolangun Kabupaten Batanghari Kabupaten Muaro Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Kabupaten Bungo Kabupaten Bungo Kabupaten Tebo Kota Jambi Kota Sungai Penuh Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Muara Enim Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi	56 44 582 65 48 31 54 765 86 13 54 122 94 59 59
89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103.	Sumatera	Kabupaten Merangin Kabupaten Sarolangun Kabupaten Batanghari Kabupaten Muaro Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Kabupaten Bungo Kabupaten Tebo Kota Jambi Kota Sungai Penuh Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Muara Enim Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Banyuasin	56 44 582 65 48 31 54 765 86 13 54 122 94 59 59 95
89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104.	Sumatera	Kabupaten Merangin Kabupaten Sarolangun Kabupaten Batanghari Kabupaten Muaro Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Kabupaten Bungo Kabupaten Tebo Kota Jambi Kota Sungai Penuh Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Muara Enim Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Banyuasin Kabupaten Banyuasin	56 44 582 65 48 31 54 765 86 13 54 122 94 59 59 95 125
89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104.	Sumatera	Kabupaten Merangin Kabupaten Sarolangun Kabupaten Batanghari Kabupaten Muaro Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Kabupaten Bungo Kabupaten Tebo Kota Jambi Kota Sungai Penuh Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Muara Enim Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Banyuasin Kabupaten Banyuasin Kabupaten Ogan	56 44 582 65 48 31 54 765 86 13 54 122 94 59 59 95
89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104.	Sumatera	Kabupaten Merangin Kabupaten Sarolangun Kabupaten Batanghari Kabupaten Muaro Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Kabupaten Bungo Kabupaten Tebo Kota Jambi Kota Sungai Penuh Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Muara Enim Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Banyuasin Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	56 44 582 65 48 31 54 765 86 13 54 122 94 59 59 95 125 98
89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104.	Sumatera	Kabupaten Merangin Kabupaten Sarolangun Kabupaten Batanghari Kabupaten Muaro Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Kabupaten Bungo Kabupaten Tebo Kota Jambi Kota Sungai Penuh Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Muara Enim Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Banyuasin Kabupaten Banyuasin Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Kabupaten Ogan	56 44 582 65 48 31 54 765 86 13 54 122 94 59 59 95 125
89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106.	Sumatera	Kabupaten Merangin Kabupaten Sarolangun Kabupaten Batanghari Kabupaten Muaro Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Kabupaten Bungo Kabupaten Tebo Kota Jambi Kota Sungai Penuh Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Muara Enim Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Banyuasin Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Kabupaten Ogan Kabupaten Musi Banyuasin Kabupaten Dgan Komering Ulu Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	56 44 582 65 48 31 54 765 86 13 54 122 94 59 59 95 125 98 53
89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107.	Sumatera	Kabupaten Merangin Kabupaten Sarolangun Kabupaten Batanghari Kabupaten Muaro Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Kabupaten Bungo Kabupaten Tebo Kota Jambi Kota Sungai Penuh Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Banyuasin Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Kabupaten Ogan Ilir	56 44 582 65 48 31 54 765 86 13 54 122 94 59 59 95 125 98 53 63
89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106.	Sumatera	Kabupaten Merangin Kabupaten Sarolangun Kabupaten Batanghari Kabupaten Muaro Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Kabupaten Bungo Kabupaten Tebo Kota Jambi Kota Sungai Penuh Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Banyuasin Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Kabupaten Ogan Ilir Kabupaten Ogan Ilir	56 44 582 65 48 31 54 765 86 13 54 122 94 59 59 95 125 98 53
89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107.	Sumatera	Kabupaten Merangin Kabupaten Sarolangun Kabupaten Batanghari Kabupaten Muaro Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Kabupaten Bungo Kabupaten Tebo Kota Jambi Kota Sungai Penuh Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Banyuasin Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Kabupaten Ogan Ilir	56 44 582 65 48 31 54 765 86 13 54 122 94 59 59 95 125 98 53 63

110.		Kabupaten Penukal	28
		Abab Lematang Ilir	
111.		Kabupaten Musi Rawas	422
112.		Utara Kota Palembang	045
112.		Kota Pagar Alam	245
114.		Kota Lubuklinggau	20 34
115.		Kota Prabumulih	28
116.	Bengkulu	Kabupaten Bengkulu	25
110.	Deligkulu	Selatan	20
117.		Kabupaten Rejang	39
		Lebong	
118.		Kabupaten Bengkulu	658
		Utara	
119.		Kabupaten Kaur	18
120.		Kabupaten Seluma	28
121.		Kabupaten Muko Muko	405
122.		Kabupaten Lebong	17
123.		Kabupaten Kepahiang	20
124.		Kabupaten Bengkulu	16
125.		Tengah Kota Bengkulu	54
126.	Lampung	Kota Bengkulu Kabupaten Lampung	2208
140.	Lampung	Selatan	4400
127.		Kabupaten Lampung	186
141.		Tengah	100
128.		Kabupaten Lampung	89
		Utara	
129.		Kabupaten Lampung	44
		Barat	
130.		Kabupaten Tulang	65
		Bawang	
131.		Kabupaten Tanggamus	87
132.		Kabupaten Lampung	2274
133.		Timur Vahynatan Way Vanan	002
134.		Kabupaten Way Kanan Kabupaten Pesawaran	983 65
134.		Kabupaten Pringsewu	58
136.		Kabupaten Mesuji	29
137.		Kabupaten Tulang	40
107.		Bawang Barat	10
138.		Kabupaten Pesisir Barat	22
138. 139.		Kabupaten Pesisir Barat Kota Bandar Lampung	22 156
		Kabupaten Pesisir Barat Kota Bandar Lampung Kota Metro	
139. 140. 141.	Kepulauan	Kota Bandar Lampung Kota Metro Kabupaten Bangka	156
139. 140. 141. 142.	Bangka	Kota Bandar Lampung Kota Metro Kabupaten Bangka Kabupaten Belitung	156 369
139. 140. 141.		Kota Bandar Lampung Kota Metro Kabupaten Bangka Kabupaten Belitung Kabupaten Bangka	156 369 48
139. 140. 141. 142. 143.	Bangka	Kota Bandar Lampung Kota Metro Kabupaten Bangka Kabupaten Belitung Kabupaten Bangka Selatan	156 369 48 27 30
139. 140. 141. 142.	Bangka	Kota Bandar Lampung Kota Metro Kabupaten Bangka Kabupaten Belitung Kabupaten Bangka Selatan Kabupaten Bangka	156 369 48 27
139. 140. 141. 142. 143.	Bangka	Kota Bandar Lampung Kota Metro Kabupaten Bangka Kabupaten Belitung Kabupaten Bangka Selatan Kabupaten Bangka Tengah	156 369 48 27 30
139. 140. 141. 142. 143.	Bangka	Kota Bandar Lampung Kota Metro Kabupaten Bangka Kabupaten Belitung Kabupaten Bangka Selatan Kabupaten Bangka Tengah Kabupaten Bangka	156 369 48 27 30
139. 140. 141. 142. 143. 144.	Bangka	Kota Bandar Lampung Kota Metro Kabupaten Bangka Kabupaten Belitung Kabupaten Bangka Selatan Kabupaten Bangka Tengah Kabupaten Bangka Barat	156 369 48 27 30 28
139. 140. 141. 142. 143.	Bangka	Kota Bandar Lampung Kota Metro Kabupaten Bangka Kabupaten Belitung Kabupaten Bangka Selatan Kabupaten Bangka Tengah Kabupaten Bangka Barat Kabupaten Belitung	156 369 48 27 30
139. 140. 141. 142. 143. 144. 145.	Bangka	Kota Bandar Lampung Kota Metro Kabupaten Bangka Kabupaten Belitung Kabupaten Bangka Selatan Kabupaten Bangka Tengah Kabupaten Bangka Barat Kabupaten Belitung Timur	156 369 48 27 30 28 30
139. 140. 141. 142. 143. 144.	Bangka Belitung	Kota Bandar Lampung Kota Metro Kabupaten Bangka Kabupaten Belitung Kabupaten Bangka Selatan Kabupaten Bangka Tengah Kabupaten Bangka Barat Kabupaten Belitung Timur Kota Pangkalpinang	156 369 48 27 30 28 30 18
139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146.	Bangka	Kota Bandar Lampung Kota Metro Kabupaten Bangka Kabupaten Belitung Kabupaten Bangka Selatan Kabupaten Bangka Tengah Kabupaten Bangka Barat Kabupaten Belitung Timur Kota Pangkalpinang Kabupaten Bintan	156 369 48 27 30 28 30
139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148.	Bangka Belitung Kepulauan	Kota Bandar Lampung Kota Metro Kabupaten Bangka Kabupaten Belitung Kabupaten Bangka Selatan Kabupaten Bangka Tengah Kabupaten Bangka Barat Kabupaten Belitung Timur Kota Pangkalpinang	156 369 48 27 30 28 30 18 30 353
139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149.	Bangka Belitung Kepulauan	Kota Bandar Lampung Kota Metro Kabupaten Bangka Kabupaten Belitung Kabupaten Bangka Selatan Kabupaten Bangka Tengah Kabupaten Bangka Barat Kabupaten Belitung Timur Kota Pangkalpinang Kabupaten Bintan Kabupaten Karimun	156 369 48 27 30 28 30 18 30 353 34
139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150.	Bangka Belitung Kepulauan	Kota Bandar Lampung Kota Metro Kabupaten Bangka Kabupaten Belitung Kabupaten Bangka Selatan Kabupaten Bangka Tengah Kabupaten Bangka Barat Kabupaten Belitung Timur Kota Pangkalpinang Kabupaten Bintan Kabupaten Karimun Kabupaten Natuna Kabupaten Lingga Kabupaten Kepulauan	156 369 48 27 30 28 30 18 30 353 34 173
139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152.	Bangka Belitung Kepulauan	Kota Bandar Lampung Kota Metro Kabupaten Bangka Kabupaten Belitung Kabupaten Bangka Selatan Kabupaten Bangka Tengah Kabupaten Bangka Barat Kabupaten Belitung Timur Kota Pangkalpinang Kabupaten Bintan Kabupaten Karimun Kabupaten Natuna Kabupaten Lingga Kabupaten Kepulauan Anambas	156 369 48 27 30 28 30 18 30 353 34 173 13 6
139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152.	Bangka Belitung Kepulauan	Kota Bandar Lampung Kota Metro Kabupaten Bangka Kabupaten Belitung Kabupaten Bangka Selatan Kabupaten Bangka Tengah Kabupaten Bangka Barat Kabupaten Belitung Timur Kota Pangkalpinang Kabupaten Bintan Kabupaten Karimun Kabupaten Natuna Kabupaten Lingga Kabupaten Kepulauan Anambas Kota Batam	156 369 48 27 30 28 30 18 30 353 34 173 13 6
139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154.	Bangka Belitung Kepulauan Riau	Kota Bandar Lampung Kota Metro Kabupaten Bangka Kabupaten Belitung Kabupaten Bangka Selatan Kabupaten Bangka Tengah Kabupaten Bangka Barat Kabupaten Belitung Timur Kota Pangkalpinang Kabupaten Bintan Kabupaten Karimun Kabupaten Karimun Kabupaten Natuna Kabupaten Lingga Kabupaten Lingga Kabupaten Kepulauan Anambas Kota Batam Kota Tanjung Pinang	156 369 48 27 30 28 30 18 30 353 34 173 13 6 220 31
139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152.	Bangka Belitung Kepulauan Riau	Kota Bandar Lampung Kota Metro Kabupaten Bangka Kabupaten Belitung Kabupaten Bangka Selatan Kabupaten Bangka Tengah Kabupaten Bangka Barat Kabupaten Belitung Timur Kota Pangkalpinang Kabupaten Bintan Kabupaten Karimun Kabupaten Karimun Kabupaten Karimun Kabupaten Lingga Kabupaten Lingga Kabupaten Kepulauan Anambas Kota Batam Kota Tanjung Pinang Kabupaten Lombok	156 369 48 27 30 28 30 18 30 353 34 173 13 6
139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155.	Bangka Belitung Kepulauan Riau Nusa Tenggara	Kota Bandar Lampung Kota Metro Kabupaten Bangka Kabupaten Belitung Kabupaten Bangka Selatan Kabupaten Bangka Tengah Kabupaten Bangka Barat Kabupaten Belitung Timur Kota Pangkalpinang Kabupaten Bintan Kabupaten Karimun Kabupaten Karimun Kabupaten Lingga Kabupaten Lingga Kabupaten Kepulauan Anambas Kota Batam Kota Tanjung Pinang Kabupaten Lombok Barat	156 369 48 27 30 28 30 18 30 353 34 173 13 6 220 31 104
139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154.	Bangka Belitung Kepulauan Riau	Kota Bandar Lampung Kota Metro Kabupaten Bangka Kabupaten Belitung Kabupaten Bangka Selatan Kabupaten Bangka Tengah Kabupaten Bangka Barat Kabupaten Belitung Timur Kota Pangkalpinang Kabupaten Bintan Kabupaten Karimun Kabupaten Natuna Kabupaten Lingga Kabupaten Kepulauan Anambas Kota Batam Kota Tanjung Pinang Kabupaten Lombok Barat Kabupaten Lombok	156 369 48 27 30 28 30 18 30 353 34 173 13 6 220 31
139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155.	Bangka Belitung Kepulauan Riau Nusa Tenggara	Kota Bandar Lampung Kota Metro Kabupaten Bangka Kabupaten Belitung Kabupaten Bangka Selatan Kabupaten Bangka Tengah Kabupaten Bangka Barat Kabupaten Belitung Timur Kota Pangkalpinang Kabupaten Bintan Kabupaten Karimun Kabupaten Karimun Kabupaten Lingga Kabupaten Lingga Kabupaten Kepulauan Anambas Kota Batam Kota Tanjung Pinang Kabupaten Lombok Barat Kabupaten Lombok Tengah	156 369 48 27 30 28 30 18 30 353 34 173 13 6 220 31 104
139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155.	Bangka Belitung Kepulauan Riau Nusa Tenggara	Kota Bandar Lampung Kota Metro Kabupaten Bangka Kabupaten Belitung Kabupaten Bangka Selatan Kabupaten Bangka Tengah Kabupaten Bangka Barat Kabupaten Belitung Timur Kota Pangkalpinang Kabupaten Bintan Kabupaten Karimun Kabupaten Karimun Kabupaten Karimun Kabupaten Karimun Kabupaten Karimun Kabupaten Lingga Kabupaten Lombok Barat Kabupaten Lombok	156 369 48 27 30 28 30 18 30 353 34 173 13 6 220 31 104
139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155.	Bangka Belitung Kepulauan Riau Nusa Tenggara	Kota Bandar Lampung Kota Metro Kabupaten Bangka Kabupaten Belitung Kabupaten Bangka Selatan Kabupaten Bangka Tengah Kabupaten Bangka Barat Kabupaten Belitung Timur Kota Pangkalpinang Kabupaten Bintan Kabupaten Karimun Kabupaten Karimun Kabupaten Lingga Kabupaten Lingga Kabupaten Kepulauan Anambas Kota Batam Kota Tanjung Pinang Kabupaten Lombok Barat Kabupaten Lombok Tengah	156 369 48 27 30 28 30 18 30 353 34 173 13 6 220 31 104 141

150		77.1	
158.		Kabupaten Sumbawa	68
159.		Kabupaten Dompu	568
160.		Kabupaten Bima	1091
161.		Kabupaten Sumbawa Barat	23
162.		Kabupaten Lombok Utara	33
163.		Kota Mataram	74
164.		Kota Bima	26
165.	NT	Kabupaten Kupang	
	Nusa		855
166.	Tenggara Timur	Kabupaten Timor Tengah Selatan	67
167.		Kabupaten Timor Tengah Utara	37
168.		Kabupaten Belu	32
169.		Kabupaten Alor	30
170.		Kabupaten Flores Timur	37
171.		Kabupaten Sikka	46
172.		Kabupaten Ende	39
173.		Kabupaten Ngada	24
174.			
		Kabupaten Manggarai	50
175.		Kabupaten Sumba Timur	567
176.		Kabupaten Sumba Barat	19
177.		Kabupaten Lembata	21
178.		Kabupaten Rote Ndao	27
179.		Kabupaten Manggarai Barat	615
180.		Kabupaten Nagekeo	21
181.			11
		Kabupaten Sumba Tengah	
182.		Kabupaten Sumba Barat Daya	51
183.		Kabupaten Manggarai Timur	42
184.		Kabupaten Sabu Raijua	15
185.		Kabupaten Malaka	28
186.		Kota Kupang	65
187.	Kalimantan	Kabupaten Sambas	78
188.	Barat	Kabupaten Mempawah	38
189.	Darat	Kabupaten Sanggau	68
190.			
		Kabupaten Ketapang	75
191.		Kabupaten Sintang	61
192.		Kabupaten Kapuas Hulu	39
193.		Kabupaten Bengkayang	37
194.		Kabupaten Landak	822
195.		Kabupaten Sekadau	29
196.		Kabupaten Melawi	30
197.		Kabupaten Kayong Utara	16
198.		Kabupaten Kubu Raya	84
199.		Kota Pontianak	94
200.		Kota Singkawang	33
201.	Kalimantan	Kabupaten Kotawaringin Barat	670
202.	Tengah	Kabupaten Kotawaringin	984
203.		Timur Kabupaten Kapuas	52
204.		Kabupaten Barito Selatan	20
205.		Kabupaten Barito Utara	19
206.		Kabupaten Katingan	375
207.		Kabupaten Seruyan	30
208.		Kabupaten Sukamara	9
209.		Kabupaten Lamandau	12
210.		Kabupaten Gunung Mas	17
211.		Kabupaten Pulang Pisau	18
411,		1 mang 1 isau	10

212.		Kabupaten Murung	17
010		Raya	
213.		Kabupaten Barito Timur	18
214.	11	Kota Palangka Raya	623
215.	Kalimantan	Kabupaten Tanah Laut	50
216.	Selatan	Kabupaten Kotabaru	50
217. 218.		Kabupaten Banjar Kabupaten Barito Kuala	85
210.		Kabupaten Tapin	45
219.		Kabupaten Hulu Sungai	28 34
		Selatan	
221.		Kabupaten Hulu Sungai Tengah	39
222.		Kabupaten Hulu Sungai Utara	34
223.		Kabupaten Tabalong	37
224.		Kabupaten Tanah	56
225		Bumbu	
225.		Kabupaten Balangan	19
226.		Kota Banjarmasin	102
227.	1	Kota Banjarbaru	586
228.	Kalimantan	Kabupaten Paser	41
229.	Timur	Kabupaten Kutai	112
230.		Kartanegara Kabupaten Berau	33
230.		Kabupaten Kutai Barat	21
231.		Kabupaten Kutai Timur	831
233.		Kabupaten Penajam	23
∡ى،		Paser Utara	40
234.		Kabupaten Mahakam Ulu	4
235.		Kota Balikpapan	92
236.		Kota Samarinda	123
237.		Kota Bontang	392
238.	Kalimantan	Kabupaten Bulungan	19
239.	Utara	Kabupaten Malinau	189
240.	o taza	Kabupaten Nunukan	29
241.		Kabupaten Tana Tidung	4
242.		Kota Tarakan	38
243.	Sulawesi Utara	Kabupaten Bolaang Mongondow	541
244.		Kabupaten Minahasa	49
245.		Kabupaten Kepulauan	19
		Sangihe	
246.		Kabupaten Kepulauan Talaud	200
		Kabupaten Kepulauan	200
246.		Kabupaten Kepulauan Talaud Kabupaten Minahasa	
246. 247.		Kabupaten Kepulauan Talaud Kabupaten Minahasa Selatan Kabupaten Minahasa	30
246.247.248.		Kabupaten Kepulauan Talaud Kabupaten Minahasa Selatan Kabupaten Minahasa Utara Kabupaten Minahasa	30
246.247.248.249.		Kabupaten Kepulauan Talaud Kabupaten Minahasa Selatan Kabupaten Minahasa Utara Kabupaten Minahasa Tenggara Kabupaten Bolaang	30 29 229
246.247.248.249.250.		Kabupaten Kepulauan Talaud Kabupaten Minahasa Selatan Kabupaten Minahasa Utara Kabupaten Minahasa Tenggara Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Kabupaten Kepulauan	30 29 229 12
246.247.248.249.250.251.		Kabupaten Kepulauan Talaud Kabupaten Minahasa Selatan Kabupaten Minahasa Utara Kabupaten Minahasa Tenggara Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Kabupaten Bolaang	30 29 229 12 144
246. 247. 248. 249. 250. 251.		Kabupaten Kepulauan Talaud Kabupaten Minahasa Selatan Kabupaten Minahasa Utara Kabupaten Minahasa Tenggara Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Kabupaten Bolaang	30 29 229 12 144 10
246. 247. 248. 249. 250. 251. 252.		Kabupaten Kepulauan Talaud Kabupaten Minahasa Selatan Kabupaten Minahasa Utara Kabupaten Minahasa Tenggara Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	30 29 229 12 144 10
246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253.		Kabupaten Kepulauan Talaud Kabupaten Minahasa Selatan Kabupaten Minahasa Utara Kabupaten Minahasa Tenggara Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Kota Manado	30 29 229 12 144 10 10
246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253.		Kabupaten Kepulauan Talaud Kabupaten Minahasa Selatan Kabupaten Minahasa Utara Kabupaten Minahasa Tenggara Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Kota Manado Kota Bitung	30 29 229 12 144 10 10 62 32
246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258.	Sulawesi	Kabupaten Kepulauan Talaud Kabupaten Minahasa Selatan Kabupaten Minahasa Utara Kabupaten Minahasa Tenggara Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Kota Manado Kota Bitung Kota Tomohon	30 29 229 12 144 10 10 62 32 16
246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257.	Sulawesi Tengah	Kabupaten Kepulauan Talaud Kabupaten Minahasa Selatan Kabupaten Minahasa Utara Kabupaten Minahasa Tenggara Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Kota Manado Kota Bitung Kota Tomohon Kota Kotamobagu Kabupaten Banggai Kabupaten Poso	30 29 229 12 144 10 10 62 32 16 283
246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260.		Kabupaten Kepulauan Talaud Kabupaten Minahasa Selatan Kabupaten Minahasa Utara Kabupaten Minahasa Utara Kabupaten Minahasa Tenggara Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Kota Manado Kota Bitung Kota Tomohon Kota Kotamobagu Kabupaten Banggai Kabupaten Poso Kabupaten Donggala	30 29 229 12 144 10 10 62 32 16 283 827 38 44
246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259.		Kabupaten Kepulauan Talaud Kabupaten Minahasa Selatan Kabupaten Minahasa Utara Kabupaten Minahasa Tenggara Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Kota Manado Kota Bitung Kota Tomohon Kota Kotamobagu Kabupaten Banggai Kabupaten Poso	30 29 229 12 144 10 10 62 32 16 283 827 38

263. Kabupaten Morowali 18 265. Kabupaten Banggai 17 265. Kabupaten Parigi 72 266. Kabupaten Tojo Una-Una 22 267. Kabupaten Sigi 519 268. Kabupaten Banggai Laut 11 269. Kabupaten Banggai Laut 11 270. Kabupaten Banggai Laut 11 270. Kabupaten Banggai Laut 11 270. Kabupaten Kepulauan 19 281 Kabupaten Kepulauan 19 282 Kabupaten Bulukumba 904 Kabupaten Bulukumba 904 405 Kabupaten Bulukumba 406 Kabupaten Gowa 111 273. Kabupaten Bentengn 405 274. Kabupaten Gowa 111 11 275. Kabupaten Gowa 111 276. Kabupaten Bone 108 277. Kabupaten Bone 108 280. Kabupaten Barru 375 281. Kabu				
Repulauan Rabupaten Parigi Moutong Mou	263.		Kabupaten Morowali	18
Kepulauan Kabupaten Parigi Moutong Mou	264.		Kabupaten Banggai	17
265. Kabupaten Parigi Moutong 72 266. Kabupaten Tojo Una- Una 22 267. Kabupaten Bigi 519 268. Kabupaten Banggai Laut 11 269. Kabupaten Banggai Laut 11 270. Kabupaten Banggai Laut 11 270. Kota Palu 857 271. Sulawesi Kabupaten Bantaen 405 272. Kabupaten Bantaeng 405 274. Kabupaten Bantaeng 405 275. Kabupaten Bantaeng 405 276. Kabupaten Bantaeng 405 277. Kabupaten Bantaeng 405 276. Kabupaten Bantaeng 405 277. Kabupaten Gowa 111 277. Kabupaten Bantaeng 405 278. Kabupaten Bantaeng 405 279. Kabupaten Bantaeng 49 281. Kabupaten Bantaeng 49 Kepulauan 375 Kabupaten Bantaeng 49				
Moutong	265		•	72
266. Kabupaten Tojo Una-Una 22 267. Kabupaten Sigi 519 268. Kabupaten Banggai Laut 11 269. Kabupaten Banggai Laut 11 270. Kabupaten Banggai Laut 19 271. Kota Palu 857 271. Selatan Kabupaten Kepulauan 19 272. Kabupaten Bulukumba 904 Kabupaten Bantaeng 405 Kabupaten Bantaeng 405 274. Kabupaten Bantaeng 405 Kabupaten Bantaeng 405 275. Kabupaten Jeneponto 52 Kabupaten Singia 35 276. Kabupaten Singia 35 Kabupaten Singia 35 277. Kabupaten Singia 35 Kabupaten Barru 375 Kabupaten Barru 375 Kabupaten Barru 375 Kabupaten Barru 375 Kabupaten Sidenreng 492 Kabupaten Sidenreng 649 Rappang 492 Kabupaten Sidenreng 817 Kabupaten Luwu 53 Kabupaten Luwu 53 Kabupaten	200.			
Una Kabupaten Sigi S19	266		Č	22
267. Kabupaten Sigi 519 268. Kabupaten Banggai Laut 11 269. Kabupaten Morowali 19 270. Kota Palu 857 271. Sulawesi Kabupaten Kepulauan 19 272. Selatan Kabupaten Bulukumba 904 273. Kabupaten Bantaeng 405 274. Kabupaten Jeneponto 52 275. Kabupaten Jeneponto 52 276. Kabupaten Jeneponto 52 277. Kabupaten Jeneponto 52 277. Kabupaten Jeneponto 52 278. Kabupaten Jeneponto 52 277. Kabupaten Jeneponto 52 277. Kabupaten Jeneponto 52 277. Kabupaten Jeneponto 52 278. Kabupaten Jenepang 49 280. Kabupaten Jenepang 49 281. Kabupaten Sinjai 35 282. Kabupaten Sidenreng 649 283. Kabu	200.			22
Each Kabupaten Banggai Laut Kabupaten Morowali Utara Kota Palu Sejavar Selatan Selatan Selayar Selayar Selayar Sejavar S	067			F10
Example Section Sect				
Utara Kota Palu 857	268.			
Utara Kota Palu 857	269.		Kabupaten Morowali	19
271. Sulawesi Selatan Kabupaten Kepulauan Selayar 19 272. Kabupaten Bulukumba 904 273. Kabupaten Bantaeng 405 274. Kabupaten Jeneponto 52 275. Kabupaten Jeneponto 52 276. Kabupaten Gowa 111 277. Kabupaten Gowa 111 278. Kabupaten Bone 108 279. Kabupaten Bone 108 280. Kabupaten Barru 375 Kabupaten Barru 375 Kabupaten Barru 375 281. Kabupaten Barru 375 282. Kabupaten Wajo 58 283. Kabupaten Sidenreng 649 284. Kabupaten Enrekang 30 285. Kabupaten Luwu 53 286. Kabupaten Luwu Utara 45 287. Kabupaten Luwu Utara 45 288. Kabupaten Luwu Utara 34 289. Kabupaten Kolaka 579 293.				
271. Sulawesi Selatan Kabupaten Kepulauan Selayar 19 272. Kabupaten Bulukumba 904 273. Kabupaten Bantaeng 405 274. Kabupaten Jeneponto 52 275. Kabupaten Jeneponto 52 276. Kabupaten Gowa 111 277. Kabupaten Gowa 111 278. Kabupaten Bone 108 279. Kabupaten Bone 108 280. Kabupaten Barru 375 Kabupaten Barru 375 Kabupaten Barru 375 281. Kabupaten Barru 375 282. Kabupaten Wajo 58 283. Kabupaten Sidenreng 649 284. Kabupaten Enrekang 30 285. Kabupaten Luwu 53 286. Kabupaten Luwu Utara 45 287. Kabupaten Luwu Utara 45 288. Kabupaten Luwu Utara 34 289. Kabupaten Kolaka 579 293.	270.		Kota Palu	857
Selatan		Sulawesi		
272. Kabupaten Bulukumba 904 273. Kabupaten Bantaeng 405 274. Kabupaten Bantaeng 405 275. Kabupaten Jeneponto 52 276. Kabupaten Takalar 43 277. Kabupaten Sinjai 35 278. Kabupaten Bone 108 279. Kabupaten Barru 35 280. Kabupaten Barru 375 280. Kabupaten Barru 375 281. Kabupaten Barru 375 282. Kabupaten Sidenreng 649 Rappang Kabupaten Sidenreng 649 Rappang Kabupaten Pinrang 817 285. Kabupaten Pinrang 817 286. Kabupaten Luwu 53 287. Kabupaten Luwu Utara 45 289. Kabupaten Luwu Timur 43 289. Kabupaten Toraja Utara 34 Kota Pare Pare 21 291. Kota Pare Pare 21 295.	2/1.			10
273. Kabupaten Bantaeng 405 274. Kabupaten Jeneponto 52 275. Kabupaten Takalar 43 276. Kabupaten Gowa 111 277. Kabupaten Bone 108 279. Kabupaten Bone 108 280. Kabupaten Barru 375 280. Kabupaten Barru 375 281. Kabupaten Barru 375 282. Kabupaten Barru 375 283. Kabupaten Barru 375 284. Kabupaten Sidenreng 649 Rappang 817 284. Kabupaten Barru 30 285. Kabupaten Firrang 817 286. Kabupaten Luwu 53 287. Kabupaten Luwu 53 288. Kabupaten Luwu Utara 45 289. Kabupaten Luwu Utara 45 290. Kabupaten Foraja Utara 34 Kota Palopo 27 293. Kota Palopo 27 <td>272</td> <td>Sciataii</td> <td></td> <td>004</td>	272	Sciataii		004
274. Kabupaten Jeneponto 52 275. Kabupaten Takalar 43 276. Kabupaten Gowa 111 277. Kabupaten Sinjai 35 278. Kabupaten Bone 108 279. Kabupaten Bone 108 280. Kabupaten Pangkajene 49 Kebulauan Kabupaten Pangkajene 49 Kebulauan Kabupaten Pangkajene 49 Kebulauan Kabupaten Barru 375 281. Kabupaten Barru 375 Kabupaten Barru 375 Kabupaten Barru 375 Kabupaten Wajo 58 Kabupaten Bidenreng 649 Rappang Kabupaten Pinrang 817 Kabupaten Firekang 30 285. Kabupaten Enrekang 30 Kabupaten Luwu Utara 45 288. Kabupaten Luwu Utara 45 Kabupaten Luwu Utara 45 289. Kabupaten Luwu Utara 3332 Kota Pare Pare 21 Kota Palepan Kabupaten Kolaka 579				
275. Kabupaten Takalar 43 276. Kabupaten Gowa 111 277. Kabupaten Sinjai 35 278. Kabupaten Bone 108 279. Kabupaten Bone 108 280. Kabupaten Pangkajene 49 Kepulauan Kabupaten Barru 375 282. Kabupaten Barru 375 283. Kabupaten Soppeng 492 283. Kabupaten Sidenreng 649 Rappang Kabupaten Sidenreng 649 Rappang Kabupaten Sidenreng 817 Kabupaten Sidenreng 649 828 284. Kabupaten Sidenreng 30 Kabupaten Sidenreng 30 817 Kabupaten Sidenreng 30 817 285. Kabupaten Liven 30 285. Kabupaten Liven 45 286. Kabupaten Liven 45 Kabupaten Liven Utara 45 Kabupaten Foraja 34 Kabupaten Kolaka <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>				
276. Kabupaten Gowa 111 277. Kabupaten Sinjai 35 278. Kabupaten Bone 108 279. Kabupaten Bone 108 280. Kabupaten Barru 375 281. Kabupaten Barru 375 282. Kabupaten Soppeng 492 283. Kabupaten Sidenreng 649 Rapang Kabupaten Sidenreng 649 Rappang Kabupaten Pinrang 817 285. Kabupaten Enrekang 30 287. Kabupaten Luwu 53 288. Kabupaten Luwu Utara 45 288. Kabupaten Luwu Utara 45 289. Kabupaten Luwu Timur 43 291. Kabupaten Toraja Utara 34 Kota Palopo 27 295. Sulawesi Kabupaten Kolaka 579 296. Tenggara Kabupaten Konawe 535 Kabupaten Buton 15 Kabupaten Konawe 66 Selatan Kabupate				
277. Kabupaten Sinjai 35 279. Kabupaten Bone 108 280. Kabupaten Maros 51 281. Kabupaten Barru 375 282. Kabupaten Soppeng 492 283. Kabupaten Soppeng 492 284. Kabupaten Sidenreng 649 285. Kabupaten Pinrang 817 286. Kabupaten Luwu 53 287. Kabupaten Luwu 53 288. Kabupaten Luwu Utara 45 289. Kabupaten Luwu Utara 45 289. Kabupaten Luwu Utara 45 Kabupaten Luwu Utara 34 Kota Palopo 291. Kabupaten Kota Wakassar 3332 294. Kota Palopo 27 295. Sullawesi Kabupaten Kolaka 579 296. Tenggara Kabupaten Konawe 535 Kabupaten Buton 15 Kabupaten Konawe 46 Selatan Kabupaten Konawe 9 46 <	275.		_	43
278. Kabupaten Bone 108 279. Kabupaten Maros 51 280. Kabupaten Pangkajene Kepulauan 49 281. Kabupaten Barru 375 282. Kabupaten Boneng 492 283. Kabupaten Wajo 58 284. Kabupaten Sidenreng Rappang 649 285. Kabupaten Enrekang 30 286. Kabupaten Luwu 53 287. Kabupaten Luwu Utara 45 289. Kabupaten Luwu Utara 45 289. Kabupaten Luwu Timur 43 Kabupaten Luwu Timur 43 Kabupaten Horaja Utara 34 Kota Makassar 3332 Kota Pare Pare 21 291. Kota Palopo 27 295. Sulawesi Kabupaten Konawe 535 296. Tenggara Kabupaten Konawe 535 Kabupaten Buton 15 Kabupaten Buton 15 299. Kabupaten Konawe 9 11 301.	276.		Kabupaten Gowa	111
278. Kabupaten Bone 108 279. Kabupaten Maros 51 280. Kabupaten Pangkajene Kepulauan 49 281. Kabupaten Barru 375 282. Kabupaten Boneng 492 283. Kabupaten Wajo 58 284. Kabupaten Sidenreng Rappang 649 285. Kabupaten Enrekang 30 286. Kabupaten Luwu 53 287. Kabupaten Luwu Utara 45 289. Kabupaten Luwu Utara 45 289. Kabupaten Luwu Timur 43 Kabupaten Luwu Timur 43 Kabupaten Horaja Utara 34 Kota Makassar 3332 Kota Pare Pare 21 291. Kota Palopo 27 295. Sulawesi Kabupaten Konawe 535 296. Tenggara Kabupaten Konawe 535 Kabupaten Buton 15 Kabupaten Buton 15 299. Kabupaten Konawe 9 11 301.	277.		Kabupaten Sinjai	35
279. Kabupaten Maros 51 280. Kabupaten Pangkajene 49 281. Kabupaten Barru 375 282. Kabupaten Soppeng 492 283. Kabupaten Wajo 58 284. Kabupaten Sidenreng 649 Rappang Kabupaten Pinrang 817 285. Kabupaten Enrekang 30 287. Kabupaten Luwu 53 288. Kabupaten Luwu Utara 45 289. Kabupaten Luwu Timur 43 289. Kabupaten Luwu Timur 43 290. Kabupaten Luwu Timur 43 480. Kota Makassar 3332 291. Kabupaten Luwu Timur 43 492. Kota Makassar 3332 Kota Pare Pare 21 293. Kabupaten Kolaka 579 294. Kabupaten Kolaka 579 295. Sulawesi Kabupaten Konawe 46 299. Kabupaten Kolaka 395				
281. Kabupaten Pangkajene Kepulauan 49 282. Kabupaten Barru 375 282. Kabupaten Soppeng 492 283. Kabupaten Wajo 58 284. Kabupaten Sidenreng Rappang 649 285. Kabupaten Pinrang 817 286. Kabupaten Enrekang 30 287. Kabupaten Luwu 53 288. Kabupaten Luwu Utara 45 289. Kabupaten Luwu Utara 45 289. Kabupaten Luwu Timur 43 291. Kabupaten Luwu Timur 43 492. Kabupaten Luwu Timur 43 288. Kota Makassar 3332 290. Kota Makassar 3332 291. Kota Pare Pare 21 Kota Palopo 27 295. Sulawesi Kabupaten Kolaka 579 296. Tenggara Kabupaten Konawe 535 299. Kabupaten Buton 15 Kabupaten Wakatobi 220 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				
Kepulauan Kabupaten Barru 375				
281. Kabupaten Barru 375 282. Kabupaten Soppeng 492 283. Kabupaten Wajo 58 284. Kabupaten Sidenreng 649 285. Rabupaten Pinrang 817 286. Kabupaten Enrekang 30 287. Kabupaten Luwu 53 288. Kabupaten Luwu Utara 45 289. Kabupaten Luwu Timur 43 290. Kabupaten Luwu Timur 43 43 Kabupaten Luwu Timur 43 45 Kabupaten Luwu Timur 43 46 Kabupaten Luwu Timur 43 47 Kabupaten Luwu Timur 43 48 Kabupaten Luwu Timur 43 492 Kabupaten Makassar 3332 402 Kota Palopo 27 295. Sulawesi Kota Palopo 27 295. Tenggara Kabupaten Kolaka 579 492 Kabupaten Muna 32 46 Kabupaten Wakatobi <	280.			49
282. Kabupaten Soppeng 492 283. Kabupaten Wajo 58 284. Kabupaten Sidenreng 649 Rappang Kabupaten Pinrang 817 286. Kabupaten Enrekang 30 287. Kabupaten Luwu 53 288. Kabupaten Luwu Utara 45 289. Kabupaten Luwu Utara 45 290. Kabupaten Luwu Timur 43 291. Kabupaten Luwu Timur 43 292. Kabupaten Luwu Timur 43 492. Kota Makassar 3332 293. Kota Makassar 3332 294. Kota Pare Pare 21 Kota Palopo 27 Kabupaten Konawe 535 Kabupaten Buton 15 Kabupaten Bonawe 50 <t< td=""><td>001</td><td></td><td></td><td></td></t<>	001			
283. Kabupaten Wajo 58 284. Kabupaten Sidenreng 649 285. Kabupaten Pinrang 817 286. Kabupaten Enrekang 30 287. Kabupaten Luwu 53 288. Kabupaten Luwu Utara 45 289. Kabupaten Luwu Timur 43 290. Kabupaten Luwu Timur 43 291. Kabupaten Luwu Timur 43 292. Kota Makassar 3332 293. Kota Pare Pare 21 294. Kota Palopo 27 295. Sulawesi Kabupaten Kolaka 579 296. Tenggara Kabupaten Konawe 535 297. Kabupaten Muna 32 298. Kabupaten Buton 15 299. Kabupaten Konawe 46 Selatan Kabupaten Wakatobi 220 Kabupaten Konawe 9 Utara Kabupaten Konawe 9 304. Kabupaten Konawe 5 Kepulauan </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				
284. Kabupaten Sidenreng Rappang 649 285. Kabupaten Pinrang 817 286. Kabupaten Enrekang 30 287. Kabupaten Luwu 53 288. Kabupaten Luwu Utara 45 289. Kabupaten Luwu Utara 45 289. Kabupaten Luwu Timur 43 291. Kabupaten Toraja Utara 34 292. Kota Makassar 3332 293. Kota Pare Pare 21 294. Kota Palopo 27 295. Sulawesi Kabupaten Kolaka 579 296. Tenggara Kabupaten Konawe 535 297. Kabupaten Konawe 46 Selatan Kabupaten Buton 15 300. Kabupaten Wakatobi 220 Kabupaten Konawe 9 Utara Kabupaten Konawe 9 301. Kabupaten Konawe 5 Kabupaten Konawe 5 Kepulauan 13 306. <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td>492</td></td<>				492
Rappang	283.		Kabupaten Wajo	58
Rappang	284.			
285. Kabupaten Pinrang 817 286. Kabupaten Enrekang 30 287. Kabupaten Luwu 53 288. Kabupaten Luwu Utara 45 289. Kabupaten Luwu Utara 45 289. Kabupaten Luwu Timur 43 291. Kabupaten Luwu Timur 43 292. Kota Makassar 34 293. Kota Pare Pare 21 Kota Palopo 27 295. Sulawesi Kabupaten Kolaka 579 296. Tenggara Kabupaten Konawe 535 297. Kabupaten Muna 32 298. Kabupaten Buton 15 299. Kabupaten Konawe 46 Selatan Kabupaten Bombana 395 Kabupaten Konawe 9 Utara Kabupaten Konawe 9 Utara Kabupaten Konawe 5 Kabupaten Konawe 5 Kabupaten Konawe 5 Kabupaten Buton 13			_	0.5
286. Kabupaten Enrekang 30 287. Kabupaten Luwu 53 288. Kabupaten Luwu Utara 45 290. Kabupaten Luwu Timur 43 291. Kabupaten Luwu Timur 43 292. Kabupaten Toraja Utara 34 292. Kota Makassar 3332 293. Kota Pare Pare 21 294. Kota Palopo 27 295. Sulawesi Kabupaten Kolaka 579 296. Tenggara Kabupaten Konawe 535 Kabupaten Muna 32 Kabupaten Muna 32 299. Kabupaten Konawe 46 Selatan 300. Kabupaten Bombana 395 Kabupaten Wakatobi 220 301. Kabupaten Kolaka Utara 22 Kabupaten Kolaka Utara 9 304. Kabupaten Buton Utara 9 Kabupaten Kolaka Timur 5 306. Kabupaten Muna Barat 12 Kabupaten Buton Utara 13 307. Kabupaten Muna Bara	285			017
287. Kabupaten Luwu 53 288. Kabupaten Tana Toraja 34 289. Kabupaten Luwu Utara 45 290. Kabupaten Luwu Timur 43 291. Kabupaten Luwu Timur 43 292. Kota Makassar 33 293. Kota Palopo 27 294. Kota Palopo 27 295. Sulawesi 579 296. Tenggara Kabupaten Kolaka 579 297. Kabupaten Konawe 535 Kabupaten Buton 15 Kabupaten Bonbana 395 300. Kabupaten Bonbana 395 Kabupaten Kolaka Utara 22 302. Kabupaten Konawe 9 Utara 9 304. Kabupaten Buton Utara 9 Kabupaten Kolaka 301 305. Kabupaten Muna Barat 12 Kab				
288. Kabupaten Tana Toraja 34 289. Kabupaten Luwu Utara 45 290. Kabupaten Luwu Timur 43 291. Kabupaten Toraja Utara 34 292. Kota Makassar 3332 293. Kota Pare Pare 21 294. Kota Palopo 27 295. Sulawesi 579 296. Tenggara Kabupaten Kolaka 579 297. Kabupaten Konawe 535 298. Kabupaten Muna 32 299. Kabupaten Buton 15 Kabupaten Bombana 395 Kabupaten Wakatobi 220 301. Kabupaten Kolaka Utara 22 303. Kabupaten Konawe 9 Utara Valuara 9 304. Kabupaten Buton Utara 9 305. Kabupaten Kolaka 301 Timur Kabupaten Muna Barat 12 307. Kabupaten Buton 13 309. Kabupaten B				
289. Kabupaten Luwu Utara 45 290. Kabupaten Luwu Timur 43 291. Kabupaten Toraja Utara 34 292. Kota Makassar 3332 293. Kota Pare Pare 21 294. Kota Palopo 27 295. Sulawesi Kabupaten Kolaka 579 296. Tenggara Kabupaten Konawe 535 297. Kabupaten Konawe 535 298. Kabupaten Buton 15 299. Kabupaten Konawe 46 Selatan Kabupaten Bombana 395 Kabupaten Wakatobi 220 301. Kabupaten Kolaka Utara 22 303. Kabupaten Konawe 9 Utara Wasupaten Kolaka 301 304. Kabupaten Konawe 5 Kabupaten Konawe 5 Kabupaten Konawe 5 Kepulauan 13 307. Kabupaten Buton 13 308. Kabupaten Buton <				
Xabupaten Luwu Timur	288.		Kabupaten Tana Toraja	34
291. Kabupaten Toraja Utara 34 292. Kota Makassar 3332 293. Kota Pare Pare 21 294. Kota Palopo 27 295. Sulawesi Kabupaten Kolaka 579 296. Tenggara Kabupaten Konawe 535 297. Kabupaten Muna 32 298. Kabupaten Buton 15 299. Kabupaten Konawe 46 Selatan Selatan 395 301. Kabupaten Bombana 395 302. Kabupaten Konawe 9 Utara Vuara 9 304. Kabupaten Buton Utara 9 305. Kabupaten Konawe 5 Kepulauan Kabupaten Konawe 5 306. Kabupaten Buton Utara 9 307. Kabupaten Buton 13 308. Kabupaten Buton 13 309. Kabupaten Buton 11 Selatan 57 310. Kota Kendari 57 Kota Baubau 25 <tr< td=""><td>289.</td><td></td><td>Kabupaten Luwu Utara</td><td>45</td></tr<>	289.		Kabupaten Luwu Utara	45
291. Kabupaten Toraja Utara 34 292. Kota Makassar 3332 293. Kota Pare Pare 21 294. Kota Palopo 27 295. Sulawesi Kabupaten Kolaka 579 296. Tenggara Kabupaten Konawe 535 297. Kabupaten Muna 32 298. Kabupaten Buton 15 299. Kabupaten Konawe 46 Selatan Selatan 395 301. Kabupaten Bombana 395 302. Kabupaten Konawe 9 Utara Vuara 9 304. Kabupaten Buton Utara 9 305. Kabupaten Konawe 5 Kepulauan Kabupaten Konawe 5 306. Kabupaten Buton Utara 9 307. Kabupaten Buton 13 308. Kabupaten Buton 13 309. Kabupaten Buton 11 Selatan 57 310. Kota Kendari 57 Kota Baubau 25 <tr< td=""><td>290.</td><td></td><td>Kabupaten Luwu Timur</td><td>43</td></tr<>	290.		Kabupaten Luwu Timur	43
292. Kota Makassar 3332 293. Kota Pare Pare 21 294. Kota Palopo 27 295. Sulawesi Kabupaten Kolaka 579 296. Tenggara Kabupaten Konawe 535 297. Kabupaten Muna 32 298. Kabupaten Buton 15 299. Kabupaten Konawe 46 Selatan Kabupaten Bombana 395 301. Kabupaten Bombana 395 302. Kabupaten Kolaka Utara 22 303. Kabupaten Konawe 9 Utara Valuaten Kolaka 301 304. Kabupaten Buton Utara 9 305. Kabupaten Konawe 5 Kepulauan Kabupaten Konawe 5 Kepulauan Kabupaten Buton 13 307. Kabupaten Buton 13 308. Kabupaten Buton 11 Selatan Selatan 310. 310. Kota Kendari 57			_	
293. Kota Pare Pare 21 294. Kota Palopo 27 295. Sulawesi Kabupaten Kolaka 579 296. Tenggara Kabupaten Konawe 535 297. Kabupaten Muna 32 298. Kabupaten Buton 15 299. Kabupaten Konawe 46 Selatan Selatan 395 301. Kabupaten Bombana 395 302. Kabupaten Wakatobi 220 303. Kabupaten Konawe 9 Utara Washupaten Konawe 9 Utara Kabupaten Konawe 5 Kepulauan Kabupaten Konawe 5 Kepulauan Kabupaten Buton 13 307. Kabupaten Buton 13 308. Kabupaten Buton 11 Selatan Kota Kendari 57 311. Kota Kendari 57 312. Gorontalo Kabupaten Bone 24 314. Kabupaten Bone <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>				
294. Kota Palopo 27 295. Sulawesi Kabupaten Kolaka 579 296. Tenggara Kabupaten Konawe 535 297. Kabupaten Muna 32 298. Kabupaten Buton 15 299. Kabupaten Konawe 46 Selatan 300. Kabupaten Bombana 395 301. Kabupaten Bombana 395 302. Kabupaten Wakatobi 220 303. Kabupaten Kolaka Utara 22 304. Kabupaten Buton Utara 9 Utara 305. Kabupaten Kolaka 301 306. Kabupaten Konawe 5 Kepulauan 5 Kepulauan 307. Kabupaten Buton 13 308. Kabupaten Buton 13 309. Kabupaten Buton 11 Selatan Kota Kendari 57 311. Kota Kendari 57 312. Gorontalo Kabupaten Boalemo 24				
295. Sulawesi Kabupaten Kolaka 579 296. Tenggara Kabupaten Konawe 535 297. Kabupaten Muna 32 298. Kabupaten Buton 15 299. Kabupaten Konawe 46 300. Kabupaten Bombana 395 301. Kabupaten Bombana 395 302. Kabupaten Wakatobi 220 303. Kabupaten Kolaka Utara 22 304. Kabupaten Konawe 9 Utara Kabupaten Buton Utara 9 305. Kabupaten Konawe 5 Kepulauan Kabupaten Konawe 5 Kepulauan Kabupaten Buton 13 307. Kabupaten Buton 13 308. Kabupaten Buton 11 309. Kabupaten Buton 11 Selatan Kota Kendari 57 Kota Baubau 25 312. Gorontalo Kabupaten Boalemo 24 Kabupaten Boalemo 24 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				
296. Tenggara Kabupaten Konawe 535 297. Kabupaten Muna 32 298. Kabupaten Buton 15 299. Kabupaten Konawe 46 300. Kabupaten Konawe 46 Selatan Kabupaten Bombana 395 301. Kabupaten Wakatobi 220 302. Kabupaten Kolaka Utara 22 303. Kabupaten Konawe 9 Utara Kabupaten Buton Utara 9 305. Kabupaten Konawe 5 Kepulauan Kabupaten Konawe 5 Kepulauan Kabupaten Buton 13 307. Kabupaten Buton 13 308. Kabupaten Buton 11 309. Kabupaten Buton 11 310. Kota Kendari 57 311. Kota Baubau 25 312. Gorontalo Kabupaten Boalemo 24 314. Kabupaten Boalemo 24			-	
297. Kabupaten Muna 32 298. Kabupaten Buton 15 299. Kabupaten Konawe 46 300. Kabupaten Bombana 395 301. Kabupaten Wakatobi 220 302. Kabupaten Kolaka Utara 22 303. Kabupaten Konawe 9 Utara 9 304. Kabupaten Buton Utara 9 305. Kabupaten Kolaka 301 Timur 306. Kabupaten Konawe 5 Kepulauan 5 Kepulauan 307. Kabupaten Buton 13 Tengah 13 Tengah 309. Kabupaten Buton 11 Selatan 11 Selatan 310. Kota Kendari 57 311. Kota Baubau 25 312. Gorontalo Kabupaten Boalemo 24 314. Kabupaten Bone 23 Bolango 23			_	
298. Kabupaten Buton 15 299. Kabupaten Konawe 46 300. Kabupaten Bombana 395 301. Kabupaten Wakatobi 220 302. Kabupaten Kolaka Utara 22 303. Kabupaten Konawe 9 Utara 9 304. Kabupaten Buton Utara 9 305. Kabupaten Kolaka 301 Timur 306. Kabupaten Konawe 5 Kepulauan 5 Kepulauan 13 307. Kabupaten Buton 13 Tengah Kabupaten Buton 11 Selatan 11 Selatan 310. Kota Kendari 57 311. Kota Baubau 25 312. Gorontalo Kabupaten Boalemo 24 314. Kabupaten Bone 23 Bolango 23		Tenggara		535
299. Kabupaten Konawe Selatan 46 300. Kabupaten Bombana 395 301. Kabupaten Wakatobi 220 302. Kabupaten Kolaka Utara 22 303. Kabupaten Konawe 9 Utara Utara 9 304. Kabupaten Buton Utara 9 Kabupaten Kolaka Timur 301 306. Kabupaten Konawe 5 Kepulauan 5 307. Kabupaten Muna Barat 12 308. Kabupaten Buton 13 Tengah 13 309. Kabupaten Buton 11 Selatan 10 310. Kota Kendari 57 Kota Baubau 25 312. Gorontalo Kabupaten Gorontalo 806 313. Kabupaten Boalemo 24 Kabupaten Boalemo 24 Kabupaten Bone 23 Bolango 23	297.		Kabupaten Muna	32
Kabupaten Konawe Selatan Selat	298.		Kabupaten Buton	15
Selatan Kabupaten Bombana 395	299			
300. Kabupaten Bombana 395 301. Kabupaten Wakatobi 220 302. Kabupaten Kolaka Utara 22 303. Kabupaten Konawe 9 Utara 9 304. Kabupaten Buton Utara 9 Kabupaten Kolaka 301 Timur 5 Kabupaten Konawe 5 Kepulauan 12 Xabupaten Muna Barat 12 Kabupaten Buton 13 Tengah 11 Selatan 57 311. Kota Kendari 57 312. Gorontalo Kabupaten Gorontalo 806 313. Kabupaten Boalemo 24 Kabupaten Bone 23 Bolango 23				. •
301.Kabupaten Wakatobi220302.Kabupaten Kolaka Utara22303.Kabupaten Konawe Utara9304.Kabupaten Buton Utara9305.Kabupaten Kolaka Timur301306.Kabupaten Konawe Kepulauan5307.Kabupaten Muna Barat12308.Kabupaten Buton 	300			305
302. Kabupaten Kolaka Utara 22 303. Kabupaten Konawe 9 304. Kabupaten Buton Utara 9 305. Kabupaten Kolaka 301 306. Kabupaten Konawe 5 Kepulauan Kabupaten Muna Barat 12 308. Kabupaten Buton 13 Tengah 11 309. Kabupaten Buton 11 Selatan Selatan 57 311. Kota Kendari 57 312. Gorontalo Kabupaten Gorontalo 806 313. Kabupaten Boalemo 24 314. Kabupaten Bone 23 Bolango Bolango 23				
303. Kabupaten Konawe Utara 9 304. Kabupaten Buton Utara 9 305. Kabupaten Kolaka Timur 301 306. Kabupaten Konawe Kepulauan 5 307. Kabupaten Muna Barat 12 308. Kabupaten Buton Tengah 13 309. Kabupaten Buton Selatan 11 310. Kota Kendari 57 311. Kota Baubau 25 312. Gorontalo Kabupaten Gorontalo 806 313. Kabupaten Boalemo 24 314. Kabupaten Bone Bolango 23				
304. Kabupaten Buton Utara 9 305. Kabupaten Kolaka 301 306. Kabupaten Konawe 5 Kepulauan Kabupaten Muna Barat 12 308. Kabupaten Buton 13 Tengah Tengah 310. Kabupaten Buton 11 Selatan Sorontalo Kota Kendari 57 311. Kota Baubau 25 312. Gorontalo Kabupaten Gorontalo 806 313. Kabupaten Boalemo 24 314. Kabupaten Bone 23 Bolango Bolango Bolango				
304. Kabupaten Buton Utara 9 305. Kabupaten Kolaka Timur 301 306. Kabupaten Konawe Kepulauan 5 307. Kabupaten Muna Barat 12 308. Kabupaten Buton Tengah 13 309. Kabupaten Buton Selatan 11 310. Kota Kendari 57 311. Kota Baubau 25 312. Gorontalo Kabupaten Gorontalo 806 313. Kabupaten Boalemo 24 314. Kabupaten Bone Bolango 23	303.			9
305. Kabupaten Kolaka Timur 301 306. Kabupaten Konawe Kepulauan 5 307. Kabupaten Muna Barat 12 308. Kabupaten Buton Tengah 13 309. Kabupaten Buton Selatan 11 310. Kota Kendari 57 311. Kota Baubau 25 312. Gorontalo Kabupaten Gorontalo 806 313. Kabupaten Boalemo 24 314. Kabupaten Bone Bolango 23				
305. Kabupaten Kolaka Timur 301 306. Kabupaten Konawe Kepulauan 5 307. Kabupaten Muna Barat 12 308. Kabupaten Buton Tengah 13 309. Kabupaten Buton Selatan 11 310. Kota Kendari 57 311. Kota Baubau 25 312. Gorontalo Kabupaten Gorontalo 806 313. Kabupaten Boalemo 24 314. Kabupaten Bone Bolango 23	304.		Kabupaten Buton Utara	9
Timur 306. Kabupaten Konawe 5 Kepulauan Kabupaten Muna Barat 12 308. Kabupaten Buton 13 Tengah 11 309. Kabupaten Buton 11 Selatan 57 310. Kota Kendari 57 311. Kota Baubau 25 312. Gorontalo Kabupaten Gorontalo 806 313. Kabupaten Boalemo 24 314. Kabupaten Bone 23 Bolango Bolango	305.			
306. Kabupaten Konawe 5 307. Kabupaten Muna Barat 12 308. Kabupaten Buton 13 Tengah 11 309. Kabupaten Buton 11 Selatan 57 311. Kota Kendari 57 312. Gorontalo Kabupaten Gorontalo 806 313. Kabupaten Boalemo 24 314. Kabupaten Bone 23 Bolango Bolango				
307. Kepulauan 308. Kabupaten Muna Barat 12 308. Kabupaten Buton 13 Tengah Tengah 11 309. Kabupaten Buton 11 Selatan 57 311. Kota Kendari 57 312. Gorontalo Kabupaten Gorontalo 806 313. Kabupaten Boalemo 24 314. Kabupaten Bone 23 Bolango Bolango 23	306			5
307. Kabupaten Muna Barat 12 308. Kabupaten Buton 13 Tengah Tengah 309. Kabupaten Buton 11 Selatan 57 310. Kota Kendari 57 311. Kota Baubau 25 312. Gorontalo Kabupaten Gorontalo 806 313. Kabupaten Boalemo 24 314. Kabupaten Bone 23 Bolango Bolango	500.		_	3
308. Kabupaten Buton Tengah 13 309. Kabupaten Buton Selatan 11 310. Kota Kendari 57 311. Kota Baubau 25 312. Gorontalo Kabupaten Gorontalo 806 313. Kabupaten Boalemo 24 314. Kabupaten Bone Bolango 23	207			10
309. Kabupaten Buton 11 310. Kota Kendari 57 311. Kota Baubau 25 312. Gorontalo Kabupaten Gorontalo 806 313. Kabupaten Boalemo 24 314. Kabupaten Bone 23 Bolango Bolango	_			
309.Kabupaten Buton Selatan11310.Kota Kendari57311.Kota Baubau25312.GorontaloKabupaten Gorontalo806313.Kabupaten Boalemo24314.Kabupaten Bone Bolango23	308.			13
Selatan Kota Kendari 57 Selatan Kota Kendari 57 Kota Baubau 25 Selatan Kabupaten Boubano 313. Kabupaten Bone Bolango				
310.Kota Kendari57311.Kota Baubau25312.GorontaloKabupaten Gorontalo806313.Kabupaten Boalemo24314.Kabupaten Bone23BolangoBolango	309.			11
311.Kota Baubau25312.GorontaloKabupaten Gorontalo806313.Kabupaten Boalemo24314.Kabupaten Bone23Bolango				
311.Kota Baubau25312.GorontaloKabupaten Gorontalo806313.Kabupaten Boalemo24314.Kabupaten Bone23Bolango	310.		Kota Kendari	57
312.GorontaloKabupaten Gorontalo806313.Kabupaten Boalemo24314.Kabupaten Bone23BolangoBolango				
313. Kabupaten Boalemo 24 314. Kabupaten Bone 23 Bolango		Gorontalo		
314. Kabupaten Bone 23 Bolango		Gordinalo		
Bolango				
	314.			23
315. Kabupaten Pohuwato 348				
	315.		Kabupaten Pohuwato	348

Sample				1
Sulawesi Sulawesi	316.		Kabupaten Gorontalo	241
State			Utara	
Sanat	317.		Kota Gorontalo	31
Sanat	318.	Sulawesi	Kabupaten Pasangkayu	26
Sacretary Sacr				
Sacretary Sacr		Darat		
Mandar Kabupaten Majene 374				
Sabupaten Majene 374 Kabupaten Mamuju 20 Tengah 325 Sabupaten Mamuju 20 Tengah 325 Sabupaten Maluku 54 Tengah Sabupaten Maluku 54 Tengah Sabupaten Maluku 14 Tengah Sabupaten Maluku 14 Tengah Sabupaten Maluku 14 Tengagara Sabupaten Maluku 14 Tengagara Sabupaten Seram 16 Sabupaten Seram 16 Bagian Timur Sabupaten Seram Bagian Timur Sabupaten Kabupaten Kepulauan 14 Aru 331 Sabupaten Maluku 11 Sabupaten Maluku 11 Sabupaten Maluku 11 Sabupaten Buru 9 Selatan 334 Sabupaten Buru 9 Selatan 335 Sabupaten Buru 336 Sabupaten Halmahera 17 Sabupaten Halmahera 17 Sabupaten Halmahera 18 Sabupaten Halmahera 18 Sabupaten Halmahera 34 Selatan 340 Sabupaten Halmahera 14 Timur 341 Sabupaten Halmahera 14 Timur 342 Sabupaten Halmahera 34 Sabupaten Halmahera 34 Sabupaten Pulau 343 Sabupaten Pulau 344 Sabupaten Pulau 345 Sabupaten Pulau 346 Sabupaten Jayawijaya 30 Sabupaten Jayawijaya 316 Sabupaten Nabire 316 Sabupaten Pulauan 350 Sabupaten Biak Numfor 320 Sabupaten Biak Numfor 320 Sabupaten Biak Numfor 320 Sabupaten Mabire 316 Sabupaten Mimika 31 Sabupaten Mabire 360 Sabupaten Mapipi 360 Sabupaten Mama 360 Sabupaten Mama 360 Sabupaten Mama 360 Sabupaten Mama	321.			63
Sacretary Sacr				
Tengah Sabupaten Maluku Sabupaten Maluku Tenggah Sabupaten Maluku Tenggara Sabupaten Kabupaten Kepulauan Tanimbar Sabupaten Seram Sabupaten Halmahera Sabupaten Halmahera Sabupaten Halmahera Sabupaten Halmahera Sabupaten Selatan Sa	322.		Kabupaten Majene	374
Tengah Sabupaten Maluku Sabupaten Maluku Tenggah Sabupaten Maluku Tenggara Sabupaten Kabupaten Kepulauan Tanimbar Sabupaten Seram Sabupaten Halmahera Sabupaten Halmahera Sabupaten Halmahera Sabupaten Halmahera Sabupaten Selatan Sa	323.		Kabupaten Mamuju	20
324. Maluku Kabupaten Maluku 54 325. Kabupaten Maluku 14 326. Kabupaten Kepulauan 16 327. Kabupaten Kepulauan 16 328. Kabupaten Seram 16 329. Kabupaten Seram 25 Bagian Timur 33 330. Kabupaten Kepulauan 14 Aru Aru 11 331. Kabupaten Maluku 11 Barat Daya Kabupaten Maluku 11 332. Kabupaten Maluku 11 Barat Daya Kabupaten Buru 9 Selatan 68 Kota Tual 333. Kota Ambon 68 Kota Tual 164 43 334. Kabupaten Halmahera 17 Utara Kabupaten Halmahera 28 Utara Kabupaten Halmahera 15 334. Kabupaten Halmahera 14 335. Kabupaten Halmahera 14 340. Kabupat			Tengah	
Tengah Kabupaten Maluku 14 Tenggara 326. Kabupaten Kepulauan 16 Tanimbar Kabupaten Buru 21 327. 328. Kabupaten Buru 21 Kabupaten Seram 16 Bagian Timur 329. Kabupaten Seram Bagian Barat Kabupaten Kepulauan 14 Aru 331. Kabupaten Maluku 11 Barat Daya Selatan Solatan So	324	Maluku	Č	54
Sabupaten Maluku	02 1.	Marana		0 1
Tenggara Kabupaten Kepulauan 16	205)	1.4
Saction	323.			14
Tanimbar Sabupaten Buru 21				4.5
Same	326.			16
Same				
Bagian Timur	327.		Kabupaten Buru	21
Bagian Timur	328.		Kabupaten Seram	16
Sagian Barat Sagian Barat Sabupaten Kepulauan Sabupaten Kepulauan Sabupaten Maluku Sabupaten Buru Selatan Sela				
Bagian Barat Kabupaten Kepulauan 14 Aru 331.	329			25
Sample	547.			
Aru	220			1.4
Salar	JSU.			14
Barat Daya Selatan S	221			1.1
Selatan Selatan Selatan Selatan Kota Ambon 68	331.			11
Selatan Kota Ambon 68				
Kota Ambon Kota Tual 164	332.		Kabupaten Buru	9
334. Kota Tual 164 335. Maluku Utara Kabupaten Halmahera Barat 17 336. Kabupaten Halmahera Tengah 8 337. Kabupaten Halmahera Utara 28 338. Kabupaten Halmahera Selatan 34 339. Kabupaten Halmahera Selatan 15 340. Kabupaten Kepulauan Sula Kabupaten Pulau Halmahera Timur 14 341. Kabupaten Pulau Halmahera Timur 8 342. Kabupaten Pulau Halmahera Timur 8 343. Kabupaten Pulau Halmahera Timur 14 344. Kabupaten Pulau Halmahera Timur 14 341. Kabupaten Pulau Halmahera Timur 14 342. Kabupaten Pulau Halmahera Timur 14 343. Kabupaten Pulau Halmahera Timur 14 344. Kabupaten Pulau Halmahera Timur 14 345. Kabupaten Pulau Halmahera Timur 14 346. Kabupaten Pulau Halmahera Timur 14 344. Kabupaten Merauke Souh Kabupaten Asmir Halmahera Timur 14 345.				
335. Maluku Utara Kabupaten Halmahera Barat 17 336. Kabupaten Halmahera Tengah 8 337. Kabupaten Halmahera Utara 28 338. Kabupaten Halmahera Selatan 34 339. Kabupaten Halmahera Selatan 15 340. Kabupaten Kepulauan Sula 14 341. Kabupaten Pulau Morotai 8 342. Kabupaten Pulau Morotai 8 343. Kota Ternate 34 344. Kota Tidore Kepulauan 14 345. Papua Kabupaten Merauke 504 346. Kabupaten Merauke 504 Kabupaten Jayawijaya 30 Kabupaten Merauke 504 Kabupaten Jayawijaya 30 Kabupaten Merauke 504 Kabupaten Jayawijaya 30 Kabupaten Merauke 504 Kabupaten Nabire 316 Kabupaten Nabire 316 Kabupaten Biak Numfor 320 Kabupaten Paniai 24 Kabupaten Biak Numfor 320 Kabupaten Merauke	333.		Kota Ambon	68
Utara Barat Kabupaten Halmahera Tengah	334.		Kota Tual	164
Utara Barat Kabupaten Halmahera Tengah	335.	Maluku	Kabupaten Halmahera	17
336. Kabupaten Halmahera 8 337. Kabupaten Halmahera 28 338. Kabupaten Halmahera 34 339. Kabupaten Kepulauan 15 340. Kabupaten Kepulauan 14 341. Kabupaten Pulau 147 Morotai Kabupaten Pulau 8 342. Kabupaten Pulau 8 343. Kota Ternate 34 344. Kota Tidore Kepulauan 14 345. Papua Kabupaten Merauke 504 346. Kabupaten Merauke 504 347. Kabupaten Jayawijaya 30 348. Kabupaten Nabire 316 349. Kabupaten Nabire 316 Kabupaten Nabire 316 Kabupaten Puncak Jaya 18 350. Kabupaten Biak Numfor 320 351. Kabupaten Puncak Jaya 18 352. Kabupaten Mimika 31 354. Kabupaten Sarmi 6 Kabupaten Sarmi 6 Kabupaten Pegunungan 165 Bint		Utara		
Tengah Kabupaten Halmahera 28 Utara	336		Kabupaten Halmahera	8
337. Kabupaten Halmahera Utara 28 338. Kabupaten Halmahera Selatan 34 339. Kabupaten Kepulauan Sula 15 340. Kabupaten Halmahera Timur 14 341. Kabupaten Pulau Morotai 8 342. Kabupaten Pulau Morotai 8 343. Kota Ternate 34 344. Kota Tidore Kepulauan 14 14 345. Papua Kabupaten Merauke 504 504 346. Kabupaten Jayawijaya 30 30 347. Kabupaten Jayapura 275 316 349. Kabupaten Nabire 316 316 349. Kabupaten Kepulauan 14 Yapen 316 350. Kabupaten Biak Numfor 320 Kabupaten Puncak Jaya 18 351. Kabupaten Puncak Jaya 18 Kabupaten Paniai 24 353. Kabupaten Mimika 31 31 354. Kabupaten Mimika 31 31 355. Kabupaten Sarmi 6 6 357. Kabupaten Pegunungan 165 Bintang 165 Kabupaten Yahukimo 28 <	000.			o o
Utara	227		,	28
338. Kabupaten Halmahera 34 339. Kabupaten Kepulauan 15 340. Kabupaten Halmahera 14 341. Kabupaten Pulau 147 Morotai Kabupaten Pulau 8 342. Kabupaten Pulau 8 Taliabu Kota Ternate 34 344. Kota Tidore Kepulauan 14 345. Kabupaten Merauke 504 346. Kabupaten Jayawijaya 30 347. Kabupaten Jayapura 275 348. Kabupaten Nabire 316 349. Kabupaten Kepulauan 14 Yapen Kabupaten Biak Numfor 320 351. Kabupaten Biak Numfor 320 351. Kabupaten Puncak Jaya 18 352. Kabupaten Paniai 24 353. Kabupaten Mimika 31 354. Kabupaten Sarmi 6 355. Kabupaten Keerom 8 356. Kabupaten Pegunungan 165 Bintang Kabupaten Yahukimo 28 358. <td>337.</td> <td></td> <td>_</td> <td>20</td>	337.		_	20
Selatan Kabupaten Kepulauan Sula Kabupaten Halmahera Timur Sula Kabupaten Halmahera Timur Sula Kabupaten Pulau Sula	220			2.4
339. Kabupaten Kepulauan 15 340. Kabupaten Halmahera 14 341. Kabupaten Pulau 147 342. Kabupaten Pulau 8 343. Kota Ternate 34 344. Kota Tidore Kepulauan 14 345. Papua Kabupaten Merauke 504 346. Kabupaten Jayawijaya 30 347. Kabupaten Jayapura 275 348. Kabupaten Nabire 316 349. Kabupaten Kepulauan 14 Yapen Kabupaten Kepulauan 14 350. Kabupaten Biak Numfor 320 351. Kabupaten Puncak Jaya 18 352. Kabupaten Paniai 24 353. Kabupaten Mimika 31 354. Kabupaten Sarmi 6 355. Kabupaten Fegunungan 165 Bintang Kabupaten Yahukimo 28 357. Kabupaten Waropen 5 360. Kabupaten Boven Digoel 150 361. Kabupaten Mappi 218 <tr< td=""><td>338.</td><td></td><td>_</td><td>34</td></tr<>	338.		_	34
340. Sula 341. Kabupaten Halmahera 14 341. Kabupaten Pulau 147 Morotai 8 147 342. Kabupaten Pulau 8 343. Kota Ternate 34 344. Kota Tidore Kepulauan 14 345. Papua Kabupaten Merauke 504 346. Kabupaten Merauke 504 347. Kabupaten Jayawijaya 30 348. Kabupaten Jayapura 275 348. Kabupaten Nabire 316 349. Kabupaten Kepulauan 14 Yapen Yapen 320 351. Kabupaten Biak Numfor 320 351. Kabupaten Puncak Jaya 18 352. Kabupaten Mimika 31 353. Kabupaten Mimika 31 354. Kabupaten Sarmi 6 355. Kabupaten Pegunungan 165 356. Kabupaten Yahukimo 28 358. Ka				
340. Kabupaten Halmahera 14 341. Kabupaten Pulau 147 342. Kabupaten Pulau 8 343. Kota Ternate 34 344. Kota Tidore Kepulauan 14 345. Papua Kabupaten Merauke 504 346. Kabupaten Jayawijaya 30 347. Kabupaten Jayapura 275 348. Kabupaten Nabire 316 349. Kabupaten Kepulauan 14 Yapen Xabupaten Biak Numfor 320 351. Kabupaten Puncak Jaya 18 352. Kabupaten Paniai 24 353. Kabupaten Mimika 31 354. Kabupaten Sarmi 6 355. Kabupaten Reerom 8 356. Kabupaten Pegunungan 165 Bintang Kabupaten Yahukimo 28 358. Kabupaten Waropen 5 359. Kabupaten Boven Digoel 150 361. Kabupaten Mappi 218 Kabupaten Asmat 14	339.			15
Timur 341. Kabupaten Pulau 147 Morotai Kabupaten Pulau 8 342. Kabupaten Pulau 8 343. Kota Ternate 34 344. Kota Tidore Kepulauan 14 345. Kabupaten Merauke 504 346. Kabupaten Merauke 504 Kabupaten Jayawijaya 30 30 Kabupaten Jayawijaya 30 30 Kabupaten Nabire 316 316 Kabupaten Kepulauan 14 7apen S50. Kabupaten Biak Numfor 320 Kabupaten Puncak Jaya 18 352. Kabupaten Paniai 24 Kabupaten Mimika 31 Kabupaten Sarmi 6 Kabupaten Keerom 8 Kabupaten Pegunungan 165 Bintang Kabupaten Yahukimo 28 Xabupaten Waropen 5 Kabupaten Boven Digoel 150 Xabupaten Asmat 14				
341. Kabupaten Pulau Morotai 147 342. Kabupaten Pulau Taliabu 8 343. Kota Ternate 34 344. Kota Tidore Kepulauan 14 345. Papua Kabupaten Merauke 504 346. Kabupaten Merauke 504 347. Kabupaten Jayawijaya 30 348. Kabupaten Jayapura 275 348. Kabupaten Nabire 316 349. Kabupaten Kepulauan 14 Yapen 350. Kabupaten Biak Numfor 320 Kabupaten Puncak Jaya 18 Kabupaten Puncak Jaya 18 Kabupaten Paniai 24 Kabupaten Mimika 31 Kabupaten Sarmi 6 Kabupaten Keerom 8 355. Kabupaten Pegunungan 165 Bintang Kabupaten Yahukimo 28 358. Kabupaten Waropen 5 360. Kabupaten Boven Digoel 150 361. Kabupaten Mappi 218 Kabupaten Asmat 14 <td>340.</td> <td></td> <td>_</td> <td>14</td>	340.		_	14
Morotai Kabupaten Pulau Taliabu Kota Ternate 34			Timur	
342. Kabupaten Pulau 8 343. Kota Ternate 34 344. Kota Tidore Kepulauan 14 345. Papua Kabupaten Merauke 504 346. Kabupaten Jayawijaya 30 347. Kabupaten Jayapura 275 348. Kabupaten Nabire 316 349. Kabupaten Kepulauan 14 Yapen Sabupaten Biak Numfor 320 351. Kabupaten Puncak Jaya 18 352. Kabupaten Paniai 24 353. Kabupaten Mimika 31 354. Kabupaten Sarmi 6 355. Kabupaten Keerom 8 356. Kabupaten Pegunungan 165 Bintang Kabupaten Yahukimo 28 357. Kabupaten Tolikara 21 359. Kabupaten Waropen 5 360. Kabupaten Boven Digoel 150 361. Kabupaten Asmat 14	341.		Kabupaten Pulau	147
342. Kabupaten Pulau 8 343. Kota Ternate 34 344. Kota Tidore Kepulauan 14 345. Papua Kabupaten Merauke 504 346. Kabupaten Jayawijaya 30 347. Kabupaten Jayapura 275 348. Kabupaten Nabire 316 349. Kabupaten Kepulauan 14 Yapen Sabupaten Biak Numfor 320 351. Kabupaten Puncak Jaya 18 352. Kabupaten Paniai 24 353. Kabupaten Mimika 31 354. Kabupaten Sarmi 6 355. Kabupaten Keerom 8 356. Kabupaten Pegunungan 165 Bintang Kabupaten Yahukimo 28 357. Kabupaten Tolikara 21 359. Kabupaten Waropen 5 360. Kabupaten Boven Digoel 150 361. Kabupaten Asmat 14				
343. 343. 344. Kota Ternate 34 345. Papua Kabupaten Merauke 504 346. Kabupaten Jayawijaya 30 347. Kabupaten Jayapura 275 348. Kabupaten Nabire 316 349. Kabupaten Kepulauan 14 Yapen Kabupaten Biak Numfor 320 Kabupaten Puncak Jaya 18 Kabupaten Paniai 24 Kabupaten Mimika 31 353. Kabupaten Sarmi 6 355. Kabupaten Keerom 8 356. Kabupaten Pegunungan 165 Bintang Kabupaten Yahukimo 28 357. Kabupaten Yahukimo 28 Kabupaten Waropen 5 360. Kabupaten Boven Digoel 150 361. Kabupaten Asmat 14	342			8
343. Kota Ternate 34 344. Kota Tidore Kepulauan 14 345. Papua Kabupaten Merauke 504 346. Kabupaten Jayawijaya 30 347. Kabupaten Jayapura 275 348. Kabupaten Nabire 316 349. Kabupaten Kepulauan 14 Yapen Kabupaten Kepulauan 14 Yapen 320 Kabupaten Puncak Jaya 18 Kabupaten Paniai 24 Kabupaten Mimika 31 Kabupaten Sarmi 6 Kabupaten Keerom 8 355. Kabupaten Pegunungan 165 Bintang Kabupaten Yahukimo 28 358. Kabupaten Waropen 5 360. Kabupaten Boven Digoel 150 361. Kabupaten Mappi 218 Kabupaten Asmat 14	5 14.			
344. Kota Tidore Kepulauan 14 345. Papua Kabupaten Merauke 504 346. Kabupaten Jayawijaya 30 347. Kabupaten Jayapura 275 348. Kabupaten Nabire 316 349. Kabupaten Kepulauan 14 Yapen Yapen 320 351. Kabupaten Biak Numfor 320 351. Kabupaten Puncak Jaya 18 Kabupaten Paniai 24 Kabupaten Mimika 31 Kabupaten Sarmi 6 Kabupaten Keerom 8 355. Kabupaten Pegunungan 165 Bintang Kabupaten Yahukimo 28 358. Kabupaten Waropen 5 360. Kabupaten Boven Digoel 150 361. Kabupaten Mappi 218 Kabupaten Asmat 14	343			2/1
345. Papua Kabupaten Merauke 504 346. Kabupaten Jayawijaya 30 347. Kabupaten Jayapura 275 348. Kabupaten Nabire 316 349. Kabupaten Kepulauan 14 Yapen Yapen 320 351. Kabupaten Biak Numfor 320 Kabupaten Puncak Jaya 18 Kabupaten Paniai 24 Kabupaten Mimika 31 Kabupaten Sarmi 6 Kabupaten Keerom 8 355. Kabupaten Pegunungan 165 Bintang Kabupaten Yahukimo 28 358. Kabupaten Tolikara 21 359. Kabupaten Waropen 5 360. Kabupaten Boven Digoel 150 361. Kabupaten Asmat 14				
346. Kabupaten Jayawijaya 30 347. Kabupaten Jayapura 275 348. Kabupaten Nabire 316 349. Kabupaten Kepulauan 14 Yapen 320 350. Kabupaten Biak Numfor 320 351. Kabupaten Puncak Jaya 18 352. Kabupaten Paniai 24 353. Kabupaten Mimika 31 354. Kabupaten Sarmi 6 355. Kabupaten Keerom 8 356. Kabupaten Pegunungan 165 Bintang Kabupaten Yahukimo 28 357. Kabupaten Yahukimo 28 358. Kabupaten Waropen 5 360. Kabupaten Boven Digoel 150 361. Kabupaten Asmat 14		Da <i>x</i>		
347. Kabupaten Jayapura 275 348. Kabupaten Nabire 316 349. Kabupaten Kepulauan 14 Yapen 320 351. Kabupaten Biak Numfor 320 351. Kabupaten Puncak Jaya 18 352. Kabupaten Paniai 24 353. Kabupaten Mimika 31 354. Kabupaten Sarmi 6 355. Kabupaten Keerom 8 356. Kabupaten Pegunungan 165 Bintang Kabupaten Yahukimo 28 358. Kabupaten Yahukimo 28 359. Kabupaten Waropen 5 360. Kabupaten Boven Digoel 150 361. Kabupaten Asmat 14		гариа		
348. Kabupaten Nabire 316 349. Kabupaten Kepulauan 14 Yapen 320 351. Kabupaten Biak Numfor 320 351. Kabupaten Puncak Jaya 18 352. Kabupaten Paniai 24 353. Kabupaten Mimika 31 354. Kabupaten Sarmi 6 355. Kabupaten Keerom 8 356. Kabupaten Pegunungan 165 Bintang Kabupaten Yahukimo 28 358. Kabupaten Tolikara 21 359. Kabupaten Waropen 5 360. Kabupaten Boven Digoel 150 361. Kabupaten Asmat 14				
349. Kabupaten Kepulauan 14 350. Kabupaten Biak Numfor 320 351. Kabupaten Puncak Jaya 18 352. Kabupaten Paniai 24 353. Kabupaten Mimika 31 354. Kabupaten Sarmi 6 355. Kabupaten Keerom 8 356. Kabupaten Pegunungan 165 Bintang Sastana 21 357. Kabupaten Yahukimo 28 358. Kabupaten Tolikara 21 359. Kabupaten Waropen 5 360. Kabupaten Boven Digoel 150 361. Kabupaten Asmat 14				
Yapen 350. Kabupaten Biak Numfor 320 351. Kabupaten Puncak Jaya 18 352. Kabupaten Paniai 24 353. Kabupaten Mimika 31 354. Kabupaten Sarmi 6 355. Kabupaten Keerom 8 356. Kabupaten Pegunungan 165 Bintang Kabupaten Yahukimo 28 357. Kabupaten Yahukimo 28 358. Kabupaten Tolikara 21 359. Kabupaten Waropen 5 360. Kabupaten Boven Digoel 150 361. Kabupaten Asmat 14				
Yapen 350. Kabupaten Biak Numfor 320 351. Kabupaten Puncak Jaya 18 352. Kabupaten Paniai 24 353. Kabupaten Mimika 31 354. Kabupaten Sarmi 6 355. Kabupaten Keerom 8 356. Kabupaten Pegunungan 165 Bintang Kabupaten Yahukimo 28 357. Kabupaten Yahukimo 28 358. Kabupaten Tolikara 21 359. Kabupaten Waropen 5 360. Kabupaten Boven Digoel 150 361. Kabupaten Asmat 14	349.		Kabupaten Kepulauan	14
350. Kabupaten Biak Numfor 320 351. Kabupaten Puncak Jaya 18 352. Kabupaten Paniai 24 353. Kabupaten Mimika 31 354. Kabupaten Sarmi 6 355. Kabupaten Keerom 8 356. Kabupaten Pegunungan 165 Bintang Kabupaten Yahukimo 28 357. Kabupaten Yahukimo 28 358. Kabupaten Tolikara 21 359. Kabupaten Waropen 5 360. Kabupaten Boven Digoel 150 361. Kabupaten Asmat 14			Yapen	<u> </u>
351. Kabupaten Puncak Jaya 18 352. Kabupaten Paniai 24 353. Kabupaten Mimika 31 354. Kabupaten Sarmi 6 355. Kabupaten Keerom 8 356. Kabupaten Pegunungan 165 Bintang Sastana 28 357. Kabupaten Yahukimo 28 358. Kabupaten Tolikara 21 359. Kabupaten Waropen 5 360. Kabupaten Boven Digoel 150 361. Kabupaten Asmat 14	350.		Kabupaten Biak Numfor	320
352. Kabupaten Paniai 24 353. Kabupaten Mimika 31 354. Kabupaten Sarmi 6 355. Kabupaten Keerom 8 356. Kabupaten Pegunungan 165 Bintang Kabupaten Yahukimo 28 357. Kabupaten Yahukimo 28 358. Kabupaten Tolikara 21 359. Kabupaten Waropen 5 360. Kabupaten Boven Digoel 150 361. Kabupaten Mappi 218 362. Kabupaten Asmat 14				
353. Kabupaten Mimika 31 354. Kabupaten Sarmi 6 355. Kabupaten Keerom 8 356. Kabupaten Pegunungan 165 Bintang Sastantang 28 357. Kabupaten Yahukimo 28 358. Kabupaten Tolikara 21 359. Kabupaten Waropen 5 360. Kabupaten Boven Digoel 150 361. Kabupaten Mappi 218 362. Kabupaten Asmat 14				
354. Kabupaten Sarmi 6 355. Kabupaten Keerom 8 356. Kabupaten Pegunungan Bintang 165 357. Kabupaten Yahukimo 28 358. Kabupaten Tolikara 21 359. Kabupaten Waropen 5 360. Kabupaten Boven Digoel 150 361. Kabupaten Mappi 218 362. Kabupaten Asmat 14				
355.Kabupaten Keerom8356.Kabupaten Pegunungan Bintang165357.Kabupaten Yahukimo28358.Kabupaten Tolikara21359.Kabupaten Waropen5360.Kabupaten Boven Digoel150361.Kabupaten Mappi218362.Kabupaten Asmat14				
356.Kabupaten Pegunungan Bintang165 Bintang357.Kabupaten Yahukimo28358.Kabupaten Tolikara21359.Kabupaten Waropen5360.Kabupaten Boven Digoel150361.Kabupaten Mappi218362.Kabupaten Asmat14				
Bintang Kabupaten Yahukimo 28 358. Kabupaten Tolikara 21 359. Kabupaten Waropen 5 360. Kabupaten Boven Digoel 150 361. Kabupaten Mappi 218 362. Kabupaten Asmat 14				
357.Kabupaten Yahukimo28358.Kabupaten Tolikara21359.Kabupaten Waropen5360.Kabupaten Boven Digoel150361.Kabupaten Mappi218362.Kabupaten Asmat14	356.			165
358.Kabupaten Tolikara21359.Kabupaten Waropen5360.Kabupaten Boven Digoel150361.Kabupaten Mappi218362.Kabupaten Asmat14	0==			
359.Kabupaten Waropen5360.Kabupaten Boven Digoel150361.Kabupaten Mappi218362.Kabupaten Asmat14				
360.Kabupaten Boven Digoel150361.Kabupaten Mappi218362.Kabupaten Asmat14				
361.Kabupaten Mappi218362.Kabupaten Asmat14			Kabupaten Waropen	5
361.Kabupaten Mappi218362.Kabupaten Asmat14	360.		Kabupaten Boven Digoel	150
362. Kabupaten Asmat 14				
indupation Support				
		<u> </u>		

	•		ı
364.		Kabupaten Mamberamo	4
		Raya	
365.		Kabupaten Mamberamo	115
		Tengah	
366.		Kabupaten Yalimo	10
367.		Kabupaten Lanny Jaya	28
368.		Kabupaten Nduga	16
369.		Kabupaten Puncak	16
370.		Kabupaten Dogiyai	14
371.		Kabupaten Intan Jaya	110
372.		Kabupaten Deiyai	163
373.		Kota Jayapura	275
374.	Papua	Kabupaten Sorong	201
375.	Barat	Kabupaten Manokwari	25
376.		Kabupaten Fak Fak	12
377.		Kabupaten Sorong	106
		Selatan	
378.		Kabupaten Raja Ampat	7
379.		Kabupaten Teluk	10
		Bintuni	
380.		Kabupaten Teluk	5
		Wondama	
381.		Kabupaten Kaimana	9
382.		Kabupaten Tambrauw	34
383.		Kabupaten Maybrat	93
384.		Kabupaten Manokwari	56
		Selatan	
385.		Kabupaten Pegunungan	74
		Arfak	
386.		Kota Sorong	39

- 2) tracing perlu dilakukan sampai mencapai lebih dari 15 kontak erat per kasus konfirmasi. Karantina perlu dilakukan pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat. Setelah diidentifikasi kontak erat harus segera diperiksa (entry-test) dan karantina dijalankan. Jika hasil perlu pemeriksaan positif maka perlu dilakukan isolasi. Jika hasil pemeriksaan negatif maka perlu dilanjutkan karantina. Pada hari ke-5 karantina, perlu dilakukan pemeriksaan kembali (exit-test) untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah/selama masa inkubasi. Jika negatif, maka pasien dianggap selesai karantina; dan
- 3) treatment perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Hanya pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan,
- k upaya percepatan vaksinasi harus terus dilakukan untuk melindungi sebanyak mungkin orang dan upaya ini dilakukan untuk menurunkan laju penularan serta mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk meninggal (sepertilansia, orang dengan komorbid) mengingat kapasitas kesehatan yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi COVID-19; dan
- memantau dan mengawasi ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis lainnya seperti oksigen yang sangat dibutuhkan dalam penanganan pasien COVID-19 sesuai harga yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

KESEBELAS

- : Gubernur, Bupati dan Wali kota agar:
 - a. mempercepat proses penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBD, apabila terdapat kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial dalam mendukung pelaksanaan PPKM maka:
 - 1) dilakukan rasionalisasi dan/atau realokasi anggaran dari program/kegiatan yang kurang prioritas pada anggaran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial;
 - 2) tata cara rasionalisasi dan/atau realokasi kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan sosial/jaring pengamanan sosial dalam mendukung pelaksanaan berpedoman PPKM kepada Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Nomor 39 Tahun 2020 Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:
 - 3) terhadap percepatan penyaluran dan pelaksanaan BLT-Dana Desa (BLT-DD):
 - a) Bupati/Wali kota untuk melakukan percepatan evaluasi APBDesa bagi Desa yang belum menetapkan Peraturan Desa mengenai APBDesa, pengesahan data KPM oleh pemerintah Daerah, perekaman Data KPM penerima BLT-DD pada Om-SPAN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b) Kepala Desa untuk melakukan pendataan dan penetapan KPM, dan menindaklanjuti dengan pelaksanaan BLT-DD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
 - b. melakukan sinkronisasi bantuan sosial yang berasal dari pusat dengan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.
- : Pendanaan untuk Pelaksanaan PPKM akibat Pandemi COVID-19 yang bersumber dari APBD:
 - a. dalam pelaksanaan PPKM akibat Pandemi COVID-19, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD;
 - b. pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan pembebanan langsung pada Belanja Tidak Terduga (BTT);

KEDUABELAS

- c. dalam hal BTT tidak mencukupi, Pemerintah Daerah melakukan penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan untuk pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu dan/atau perubahan alokasi anggaran serta memanfaatkan uang kas yang tersedia melalui perubahan peraturan kepala daerah tentang APBD, dan memberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hasil alokasi anggaran penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan dimaksud dialihkan untuk belanja tidak terduga; dan
- d. tata cara penggunaan BTT dalam rangka pelaksanaan PPKM akibat Pandemi COVID-19 yang bersumber dari APBD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020.

KETIGABELAS

- : a. Dalam hal Gubernur, Bupati dan Wali kota tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Menteri ini, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Untuk pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, transportasi umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf j tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Instruksi ini dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
 - 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 - 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan; dan
 - 4) Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah; serta
 - 5) Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

KEEMPATBELAS

: Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021.

> Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 8 November 2021 MENTERI DALAM NEGERI,

> > ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan Yth:

- 1. Presiden Republik Indonesia;
- 2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
- 3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- 4. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan;
- 5. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- 6. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- 7. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
- 8. Menteri Sekretaris Negara;
- 9. Menteri Agama;
- 10. Menteri Keuangan;
- 11. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
- 12. Menteri Kesehatan;
- 13. Menteri Sosial:
- 14. Menteri Ketenagakerjaan;
- 15. Menteri Perindustrian;
- 16. Menteri Perdagangan;
- 17. Menteri Perhubungan;
- 18. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
- 19. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- 20. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
- 21. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- 22. Sekretaris Kabinet;
- 23. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
- 24. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 25. Jaksa Agung Republik Indonesia;
- 26. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
- 27. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- 28. Gubernur Bank Indonesia;
- 29. Ketua Otoritas Jasa Keuangan;
- 30. Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik;
- 31. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; dan
- 32. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Hukum,

R. Gani Muhamad,

Pembina Utama Mud NIP. 19690818 19960